PENGARUH SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) TERHADAP EFISIENSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

(Studi Kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

RAGIEL BAGUS KRISOPRAS
NIM : 115030501111014

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

MALANG

2016

MOTTO

The idea here is simple, if you can Dream it, it is possible.

Jorge Lorenzo

"Jika ada orang berilmu tapi masih suka menjatuhkan orang lain didepan umum untuk menunjukan dirinya lebih pintar, Dia bukanlah orang yang berilmu yang bijak"

Ustadz Jefri Al Buchori

repository.ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: Pengembangan kapasitas aparatur di daearah otonom baru (studi kasus Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara)
Disusun Oleh	: Khair Alam Maulansyah
NIM	: 115030507111023
Fakultas	: Fakultas Ilmu Administrasi
Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Minat	: Ilmu Administrasi Pemerintahan

Malang, 02 MEI 2016

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Dr. Imam Hanafi M.Si. MS.	**Dr. rer. pol. Romy Hermawan, M.AP**
NIP. 19691002 199802 1 001	**NIP. 19610204 198601 1 001**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

repository.ub.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 2016

KHAIR ALAM MAULANSYAH

NIM. 115030507111023

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYAKU INI KEPADA

AYAH DAN IBUKU TERCINTA

repository.ub.ac.id

RANGKUMAN

Ragiel Bagus Krisopras, 2016, Pengaruh Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Terhadap Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang), Dosen Pembimbing I: Dr. Rer. Pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP, Pembimbing II: Drs. Muhammad Sobaruddin, M.A.

Kata Kunci: Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi dalam mewujudkan *good governant* dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan.

Tujuan penelitian ini yaitu 1) menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang meliputi dimensi *tangible assurance*, transparansi, akuntabilitas, patisipasif, *efektiveness*, dan *responsiviness* terhadap efisiensi pengadaan barang barang dan jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang) 2) Untuk menganalisis dimensi yang mempunyai pengaruh dominan terhadap efisiensi pengadaan barang barang dan jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang).

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode kuantitatif. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan bagian pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *total sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dan simultan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang meliputi dimensi *tangible assurance*, transparansi, akuntabilitas, patisipasif, *efektiveness*, dan *responsiviness* terhadap efisiensi pengadaan barang barang dan jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang). *Transparansi* mempunyai pengaruh dominan terhadap efisiensi pengadaan barang barang dan jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang). Adanya pengaruh dominan menunjukkan bahwa dengan adanya keterbukaan dalam pelayanan, memberikan kemudahan dalam pelayanan dan dapat diakses semua pihak memiliki pengaruh yang paking tinggi terhadap upaya peningkatan efisiensi pengadaan barang barang dan jasa.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SUMMARY

Ragiel Bagus Krisopras, 2016, Effect System Electronic Procurement Service (procurement) to the efficiency of the Procurement of Goods and Services (A case study in Saiful Anwar Hospital Malang), Supervisor: Dr. Rer. Pol. Romy Hermawan, Sos, M.AP, Supervisor: Drs. Muhammad Sobaruddin, MA

Keywords: System Electronic Procurement (e-procurement) and Efficiency Procurement

Procurement (Procurement Board / services Electronic) is a unit formed around the Ministry / Agency Regional Unit Device / institutions (K / LD / I) to implement the services procurement of goods / services as well as facilitating electronic procurement officials in making procurement goods / services electronically. Procurement of goods / services electronically will increase transparency and accountability, improve market access and fair competition, improve the efficiency of procurement processes, supports the process of monitoring and auditing, and meet the needs of access to information in creating good governant in the procurement of goods / services administration.

The aim of this study is 1) to analyze the effect of partial and simultaneous Service System of Electronic Procurement (e-procurement) that includes tangible assurance, transparency, accountability, patisipasif, efektiveness, and responsiviness the efficiency of procurement of goods and services (Case studies in Hospital Saiful Anwar Malang) 2) To analyze the dimensions of which have a dominant influence on the efficiency of the procurement of goods and services (Case studies in Saiful Anwar Hospital Malang).

This study will be carried out by a quantitative method. The research population is the employees of procurement of goods and services in Saiful Anwar Hospital Malang. The sampling technique used in this research is using sampling techniques with a total sample size of 100 respondents.

The results showed that there was partial and simultaneous Service System of Electronic Procurement (e-procurement) that includes tangible assurance, transparency, accountability, patisipasif, efektiveness, and responsiviness the efficiency of procurement of goods and services (Case studies in Saiful Anwar Hospital City Malang). Transparency has a dominant influence on the efficiency of the procurement of goods and services (Case studies in Saiful Anwar Hospital Malang). The existence of a dominant influence shows that the lack of transparency in service, providing facilities and services in accessible all parties have a high influence gasket on improving the efficiency of the procurement of goods and services.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, anugerah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaruh Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Terhadap Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa(Studi pada Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang).** Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara moral maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. rer. pol. Romy Hermawan, M.AP Selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan dorongan moril serta saran selama mengajar dan membimbing saya.

5. Bapak Drs. Muh. Shobaruddin, MA selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah yang telah membimbing, memberikan banyak arahan dan dorongan semangat kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen di Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga, sehingga saya dapat lulus dengan hasil yang baik.
7. Seluruh pegawai dan komponen yang ada di Dinas Provinsi Kalimantan Utara yang telah membantu penulis dalam proses penelitian di lapangan.
8. Teman-teman seperjuangan Administrasi Pemerintahan angkatan 2011 atas dukungan serta bantuan selama mengerjakan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
MOTTO ..... **ii**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **v**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **vi**
RINGKASAN ..... **vii**
SUMMARY ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN
A. LatarBelakang 1
B. RumusanMasalah 5
C. TujuanPenelitian 6
D. Kontibusi Penelitian 6
E. SistematikaPenulisan 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Pelayanan Publik
1. Pengertian Pelayanan Publik 9
2. Prinsip Pelayanan Publik 10
3. Asas PelayananPublik 12
4. Paradigma Pelayanan Publik 13
5. Administrasi Publik 14
B. Pengadaan Barang dan Jasa 19
1. PengertianPengadaan Barang dan Jasa 19
2. Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Sakit 19
C. Efisiensi 21
1. Konsep Efisiesni 21
2. Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE 23
D. Elektronik*Governance* 25
1. Pengertian Elektronik *Government* 25
2. Manfaat Elektronik *Government* 26
3. Jenis-Jenis Pelayanan Pada Elektronik *Government* 28

4. Prinsip Pelaksanaan dan Pengembanagan Elektronik *Government*.....31
5. Dimensi Kualitas Pelayanan *E-Government* 32
E. *New Public Management*.....34
1. Alasan Munculnya Teori Manajemen Publik 34
2. Pengertian *Public Management* dan *New Public Management*.....34
3. Karakteristik dan Prinsip *New Public Management* 37
4. Tujuan Manajemen Publik.....39
5. Kritik terhadap Penerapan NPM.....40
F. PenelitianTerdahulu.....41
G. KerangkaPikir.....44
H. Hipotesis 46

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 47
B. LokasiPenelittian 47
C. Populasi dan Sampel.....47
D. Variabel, Definisi Operasionaldan Pengukuran 48
E. Pengumpulan Data.....51
F. MetodeAnalisis Data 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum.....59
B. Gambaran Karakteristik Responden.....60
C. Hasil Uji Instrumen.....72
D. Diskripsi Jawaban Responden.....75
E. Metode Analisis Data 87
1. Hasil Uji Asumsi Klasik.....87
2. Hasil Analisis Regresi Berganda 90
3. Hasil Uji Hipotesis I 94
4. Hasil Uji Hipotesis II.....96

BAB V PENUTUP
A. Simpulan.....97
B. Saran.....98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
2.1	Model Kerangka Hipotesis	45
4.1	Bagan Struktur Organisasi RSUD dr. Saiful Anwar Malang 2016	61

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
3.1	Penentuan Skor Jawaban Responden	51
4.1	Jumlah Karyawan yang Bertugas di Setiap Poliklinik	67
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	69
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	70
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	70
4.5	Status Perkawinan Responden	71
4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	72
4.7	Hasil Uji Validitas	73
4.8	Hasil Uji Reliabilitas	75
4.9	Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel *Tangible* (X_1)	76
4.10	Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel *Assurance* (X_2)	77
4.11	Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel *Transparansi* (X_3)	79
4.12	Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel *Akuntabilitas* (X_4)	80
4.13	Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel *Partisipasif* (X_5)	81
4.14	Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel *Efektiveness* (X_6)	83
4.15	Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel (X_7)	84
4.16	Diskripsi Jawaban Responden Tentang Efisiensi pengadaan barang barang dan jasa Konsumen (Y)	86
4.17	Hasil Pengujian Multikolinearitas	88
4.18	Hasil Uji Normalitas Data	90
4.19	Hasil Analisis Regresi Berganda	91
4.20	Perbandingan Antara Nilai t_{hitung} Dengan t_{Tabel}	95

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran
1	Angket Penelitian
2	Skor Hasil Penelitian
3	Hasil Distribusi Frekuensi
4	Hasil Uji Validitas
5	Hasil Reability
6	Hasil Analisis Regresi
7	Curiculum Vitae

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa pada suatu instansi atau perusahaan merupakan kegiatan yang rutin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa serta untuk berlangsungnya kegiatan operasional instansi atau perusahaan tersebut (Heryandi, 2011: 41). Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa tersebut, instansi atau perusahaan akan melakukan serangkaian pembelian yang dilakukan secara langsung atau dengan bekerjasama dengan *suplier*. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang penting, karena menyangkut kelancaran kegiaan operasional perusahaan dan keberlangsungan hidup perusahaan.

Pengadaan barang dalam instansi pemerintahan, yang berjumlah besar dilakukan melalui tender. Oleh karenanya pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan (Heryandi, 2011: 42). Untuk menciptakan efektivitas penyediaan barang, maka peran teknologi sangat dibutuhkan. Hal ini karena penggunaan teknologi, khusunya teknologi informasi sangat diperlukan perusahaan dalam menyediakan informasi terkait dengan penyediaan barang (Widiastuti, 2008: 1). Informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan suplier maupun instansi pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa tanpa sistem elektronik telah mengakibatkan penyalagunaan anggaran negara mencapai 10-50 persen. Selain itu juga dapat mengakibatkan beberapa permasalahan seperti tender arisan dan adanya *kickback* pada proses tender, terjadinya suap untuk memenangkan tender, proses tender

yang tidak transparan, supplier bermain mematok harga tertinggi (*mark up*), memenangkan perusahaan saudara/kerabat/orang partai tertentu. Pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha, adanya almamater sentris, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang, tender tidak diumumkan dan tidak membuka akses peserta dari daerah (Udoyono, 2012 : 128).

Pelaksanaan pengadaan barang tersebut seringkali banyak terjadi penyelewengan. Kontrak yang tidak sesuai ketentuan, proses tender yang tidak benar, mark-up harga dengan besaran yang tidak masuk akal, pejabat pembuat komitmen yang nakal, tidak maksimalnya hasil kerja penyedia. Adanya penyelewengan ini pada akhirnya akan dapat menjadikan pemborosan anggaran. Hal ini terbukti dengan 80% kasus korupsi yang ada terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah (Pratiwi, 2014: 344).

Salah satu upaya yang digunakan pemerintah dalam mengurangi permasalahan penyediaan barang/jasa dipemerintahan adalah dengan menciptakan transparansi publik. Melalui Inpres No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-govermment*. Pengembangan e-govermment merupakan upaya mengembangkan penyelengaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (Nightisabha, 2009: 129).

Implementasi dari pengembangan *e-governance* dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang profesional, pemerintah menerapkan, pemerintah menerapkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang disebut e-

procurement. Secara umum tujuan *e-procurement* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam pengadaan barang dan jasa (Pratiwi, 2014: 344)

Berdasarkan peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, *e-procurement* bertujuan untuk memberikan media proses pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Peraturan presiden ini diperkuat oleh instruksi Presiden No 1 Tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberatasan korupsi. Salah satu isinya adalah mewajibkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sistem elektronik (*e-procurement*) untuk 100% pengadaan barang di lingkup kementrian dan pemerintah daerah. *E-procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE (Udoyono, 2012: 130)

LPSE (Lembaga Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik) adalah unit kerja yang dibentuk seluruh Kementrian/Lembaga Satuan Kerja Perangka Daerah/institusi lainnya (K/LD/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi pejabat pengadaan dalam melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi dalam mewujudkan *good governant* dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan (LKPP, 2015)

Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini adalah E-Tendering yaitu tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan menyampaikan 1 (satu) penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Tata cara ETendering, syarat dan ketentuan serta panduan pengguna (user guide) diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu di dalam SPSE juga telah disiapkan fasilitas untuk proses audit secara online (*E-Audit*), Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah dan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*). (Kementrian perindustrian, 2015)

Sebagai bagian dari lembaga pemerintahan, dalam pengadaan barang dan jasa, RSUD Saiful Anwar juga harus menerapkan Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dilakukan oleh LPSE (Lembaga Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik). Sebagaimana telah diketahui, tujuan utama pengadaan barang dan jasa oleh LPSE adalah untuk untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan, dan menghindari praktik kolusi dan korupsi, yang dapat merugikan negara. Sistem pengadaan barang dan jasa juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya pengadaan barang dan jasa, karena sistem pengadaan barang dan jasa secara manual dapat menjadikan

pemborosan anggaran. Berdasarkan penelitian terdahulu banyak sekali hambatan-hambatan dalam pelaksanaan layanan pengadaan mulai dari akuntabilias, kapasitas jaringan yang terbatas dan realisasi anggaran yang tidak tepat pada waktunya, maka merujuk pada penelitian terdahulu tersebut penulis dalam penelitian ini mencoba memasukan teori effisiensi untuk mendapatkan hasil penelitian yang dibutuhkan. Terkait dengan latar belakang yang ada, Penelitian ini mengambil tema penelitian ini adalah Pengaruh Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Terhadap Efisiensi Pengadaan Barang Barang dan Jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang)

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang meliputi dimensi *tangible assurance*, transparansi, akuntabilitas, patisipasif, *efektiveness*, dan *responsiviness* terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang)?
2. Dimensi apakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap efisiensi pengadaan barang barang dan jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang meliputi dimensi *tangible assurance*, transparansi, akuntabilitas, patisipasif, *efektiveness*, dan *responsiviness* terhadap efisiensi pengadaan barang barang dan jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang)
2. Untuk menganalisis dimensi yang mempunyai pengaruh dominan terhadap efisiensi pengadaan barang barang dan jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang).

D. Kontribusi Penelitian

1 Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan teori sistem, khususnya mengenai Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan dampaknya terhadap efisiensi pengadaan barang barang dan jasa

2 Manfaat bagi instansi

Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami kelemahan sistem LPSE dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi sistem pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan LPSE

3 Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian yang terkait dengan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan efisiensi pengadaan barang barang dan jasa.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka skripsi ini terdiri dari lima pokok bahasan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Mengemukakan dan menguraikan mengenai latar belakang mengenai peningkatan efisiensi pengadaan barang dan jasa oleh ULP melalui LPSE dan perlunya dilakukannya penelitian, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan kajian terhadap teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori yang digunakan antara lain Pelayanan Publik, Pengadaan Barang dan Jasa, Efisiensi dan E-Goverment yang nantinya akan menjadi dasar dalam kajian pokok pembahasan, ditambah dengan perspektif dari peneliti sendiri mengenai teori-teori dasar tersebut.

BAB III. METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian termasuk di dalamnya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Davidow dalam Waluyo (2007: 127) mendefenisikan pelayanan sebagai hal yang jika diterapkan terhadap sesuatu produk, akan meningkatkan daya atau nilai terhadap pelanggan. Pelayanan yang baik membutuhkan instruktur pelayanan uang sangat baik pula. Sedangkan menurut Boediono (2003: 60), pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengn cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptnaya kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara (Men-PAN) No.81 tahun 1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara / Daerah dalam bentuk barabg atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, dinyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Nurmandi (1999: 14) Pelayanan publik mempunyai beberapa ciri yaitu:

a. Tidak dapat memilih konsumen, artinya setiap masyarakat yang datang dan membutuhkan pelayanan harus diperlakukan secara baik
b. Peranannya dibatasi oleh undang-undang, artinya dalam menjalankan tugas melayani kepentingan masyarakat, tetap ada norma, aturan dan ketentuan yang menjadi batas dan dasar.
c. Politik menginstitusionalkan konflik, artinya berbagai konflik dan permasalahan yang terjadi sering merupakan dampak dari politik.
d. Pertanggungjawaban yang kompleks, karena mengatasnamakan Negara maka dalam pelayanan publik ada berbagai prosedur yang tetap harus dijalankan.
e. Sangat sering diteliti.
f. Semua tindakan harus mendapat justifikasi.
g. Tujuan atau output sulit diukur atau ditentukan.

Dalam UU No 25 tahun 2009 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi:

a. pelaksanaan pelayanan;
b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
c. pengelolaan informasi;
d. pengawasan internal;
e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
f. pelayanan konsultasi

2. Prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggara pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standart, pola penyelenggara, biaya, pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggara, penyelesaian pengaduan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.

Adapun prinsip pelayanan publik di dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

a. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:

1) Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik.
2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaikan keluhan atau persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
4) Kepastian waktu.

c. Kepastian Waktu

Pelaksanan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

e. Keamanan

Proses dan produksi pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

f. Tanggungjawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelaksananan pelayanan publik.

g. Kelengkapan saran dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasaran kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

h. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

i. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan

Pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, dan ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelyanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain (Rochmah,2011: 7).

3. Asas Pelayanan Publik

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan (Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004) sebagai berikut:

a. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b.Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegangan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

d.Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

e. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomis.

f. Keseimbangan Hak dan

Pemberian dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

4. Paradigma Dalam Pelayanan Publik

Pada masa sekarang ini, telah terjadi berbagai perkembangan paradigma tentang pelayanan publik. Dalam konteks perkembangan Ilmu Administrasi Publik, terdapat tiga aliran atau periode yaitu The Old Publik Administration, New Publik Managemant dan The New Pulic Service. The Old Publik Administration menempatkan masyarakat sebagai klien yamg tidak mempunyai kekuatan (powerless) sehingga harus patuh terhadap semua ketentuan birokrasi. (Mardiasmo, 2003: 6) Sedangkan dalam paradigma New

Publik Managemant meletakkan mekanisme pasar sebagai pedoman dalam pelayanan publik. Dalam paradigma ini konsep Reinventing Goverment yang merupakan hasil pemikiran David Osborne dan Ted Gaebler, menjadi dasar dalam pelayanan publik. Paradigma yang sekarang adalah The New Pulic Service yang menempatkan warga masyarakat sebagai warganegara (citizens) yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang memadai dari negara. Secara tegas The New Pulic Service menyodorkan doktrin baru dalam Studi Administrasi Publik yaitu:

a. Melayani warganegara, bukan konsumen.
b. Mengutamakan kebutuhan publik.
c. Nilai-nilai kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan.
d. Berfikir strategis, bertindak demokratis.
e. Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan hal yang sederhana.
f. Lebih melayani daripada mengarahkan.
g. Mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekedar mengejar produktivitas. (Denhardt & Denhardt, 2003).

5. Administrasi Publik

Secara etimologis, Administrasi berasal dari bahasa latin yang tediri dari dua suku kata yaitu *"ad"* dan *"ministrate"* yang dalam bahasa inggri berarti *"to serve",* sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Terdapat banyak pakar baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang mendefinisikan administrasi. Herbert A. Simon dalam Pasolong (2008:2), mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Leonard D. White dalam Pasolong (2008:2), mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Selanjutnya Siagian (2004:2), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. The Liang Gie dalam Pasolong (2008:3), mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang didalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Kemudian Pasolong (2008:3), menjelaskan mengenai administrasi sendiri sebagai pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional. Dapat disimpulkan bawa administrasi merupakan rangkaian kegiatan dari sekelompok orang yang bekerja dalam ruang lingkup organisasi dan memiliki tujuan serta sasaran yang harus dicapai sebagai aspek penting dari organisasi tersebut.

a. Dimensi Administrasi

Menurut Pasolong (2008:3-5), administrasi memiliki dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur yang melekat pada administrasi, dimensi karakteristik administrasi tersebut diantaranya:

1) Efisien berarti bahwa tujuan dari pada administrasi adalah untuk mencapai hasil yang secara efektif dan efisien. Dengan kata lain bahwa pencapaian tujuan administrasi dengan hasil yang berdaya guna dan berhasil guna.
2) Efektivitas berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau sasaran tercapai dengan proses kegiatan.
3) Rasional berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk maksud yang berguna, tetapi tentu saja dilakukan dengan sadar atau sengaja. Helbert A. Simon (2004), mengatakan bahwa rasioal secara obyektif, jika tujuan yang hendak dicapai untuk kepentingan organisasi,

rasional bersifat subjektif, jika tujuan yang ingin dicapai untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya dijelaskan mengenai dimensi unsur-unsur administrasi yaitu:

1) Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan.
2) Adanya kerja sama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.
3) Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Dengan demikian unsur-unsur administrasi diatas menekankan pada tiga hal yaitu adanya tujuan atau sasaran, adanya kerja sama, dan sarana. Melalui tiga hal tersebut, suatu organisasi diharapkan mampu menerapkan unsur-unsur administrasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk itu, dimensi karakteristik dan unsur administrasi perlu dipahami setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, agar dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.

b. Pengertian Administrasi Publik

Konsep Administrasi Publik semakin berkembang dari zaman klasik hingga sekarang. Administrasi publik di Indonesia biasa disebut dengan administrasi Negara. Hal ini disebabkan karena buku buku asing yang berjudul "*public administration"* diterjemahkan dengan Administrasi Negara. Terdapat berbagai definisi mengenai Administrasi publik yang berkembang oleh para pakar administrasi.

Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa administrasi publik adalah

"Proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan

mengelola *(manage)* keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan."

Dwight Waldo dalam Pasolong (2008:8), mendefinisikan administrasi publik merupakan manajemen dan organisasi dan manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Kemudian Pasolong (2008:8), menyimpulkan administrasi publik merupakan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang, atau lembaga, dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Penerapan Administrasi Publik dalam suatu Negara sangat penting terhadap bagaimana pelakasanaan pemerintahan. Menurut Keban (2004:15), administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknis efisiensi dan efektivitas, serta lebih menguntungkan masyarakatnya. Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa tujuan dari administrasi publik guna memberikan kemudahan terhadap jalannya pemerintah dalam pelayanan publik melalui profesionalisme birokratnya dan selalu menjunjung efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dari pemerintah itu sendiri. Administrasi publik lebih menekankan mengenai program yang berorientasi pada kepentingan publik. Dalam kegiatan administrasi publik diupayakan dalam pencapaian tujuannya melalui perencanaan yang matang serta adanya perbandingan antara input dan outputnya.

c. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Nicholas Henry dalam Pasolong (2008:19), memberikan rujukan tentang ruang lingkup administrasi publik yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas dalam perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain :

a. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku organisasi.
b. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia.
c. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafiie dkk (1999:29), menguraikan ruang lingkup administrasi publik sebagai berikut:

a. Di bidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan, meliputi: Administrasi pemerintahan pusat, adminisrasi pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan kecamatan, administrasi pemerintahan kelurahan, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan kotamadya, administrasi pemerintahan kota administratif, administrasi departemen, administrasi non-departemen.
b. Dibidang kekuasaan, meliputi: administrasi politik luar negeri, administrasi politik dalam negeri, administrasi partai politik, administrasi kebijaksanaan pemerintah.
c. Dibidang peraturan perundang-undangan, meliputi: landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan operasional.
d. Dibidang kenegaraan, meliputi: tugas dan kewajiban Negara, hak dan kewenangan Negara, tipe dan bentuk Negara, fungsi dan prinsip Negara, unsur-unsur Negara, tujuan Negara dan tujuan nasional.
e. Dibidang pemikiran hakiki, meliputi: etika administrasi publik, estetika administrasi publik, logika administrasi publik, hakekat administrasi publik.
f. Dibidang ketatalaksanaan, meliputi: administrasi pembangunan, administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kemiliteran, administrasi kepolisian, administrasi perpajakan, administrasi pengadilan, administrasi kepenjaraan, administrasi perusahaan meliputi (i) diantaranya administrasi penjualan, (ii) administrasi periklanan, (iii) administrasi pemasaran, (iv) administrasi perbankan, (v) administrasi perhotelan, (vi) administrasi pengangkutan.

Dari kedua penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup administrasi publik berkaitan dengan bidang-bidang organisasi yang kemudian dipersempit hanya pada organisasi publik. Dengan adanya ruang lingkup ini, semakin memperjelas pembahasan-pembahasan tentang administrasi publik itu sendiri. Sehingga muncul memberi batasan bagi seseorang yang ingin membahas atau menerapkan teori tentang administrasi publik.

B. Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa. Tahap-tahap dalam pengadaan barang dan jasa dengan prakualifikasi yaitu: (Keppres No 54, 2010)

a. pengumuman prakualifikasi
b. pengambilan dokumen prakualifikasi
c. pemasukan dokumen prakualifikasi
d. evaluasi dokumen prakualifikasi
e. penetapan hasil prakualiflkasi x
f. pengumuman hasil prakualifikasi
g. masa sanggah prakualifikasi
h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi
i. pengambilan dokumen lelang umum
j. penjelasan
k. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya
l. pemasukan penawaran
m. pembukaan penawaran
n. evaluasi penawaran
o. penetapan pemenang
p. pengumuman pemenang
q. masa sanggah

2. Pengadaan Barang dan jasa Pada Rumah sakit

Barang publik adalah barang kolektif yang seharusnya dikuasai oleh negara atau pemerintah. Sifatnya tidak eksklusif dan diperuntukkan bagi

kepentingan seluruh warga dalam skala luas. Sedangkan barang swasta adalah barang spesifik yang dimiliki swasta dan sifatnya eksklusif dan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membelinya, karena harganya disesuaikan dengan harga pasar menurut rumus sang penjualan (Bastian, 2009: 55).

Bagi instansi pemerintahaan, kebutuhan barang dan jasa sangatlah besar, dan ketersediaannya harus selalu ada, agar tidak mengganggu pelayanan publik. Oleh karenanya, pengadaan barang dan jasa bagi instansi pemerintahaan, termasuk juga Rumah Sakait pemerintah dilakukan oleh suplier melalui tender yang dikeluarkan intansi tersebut. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (Perpres RI No 54, 2010)

Barang dan jasa pada dasarnya dilakukan melalui dua mekanisme, yait mekanisme pasar (market mechanism) dan mekanisme birokrasi (*bureuaucutic mechanism*). Mekanisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat mendorong pemakaian sumber daya secara efisien (Bastian, 2009:54).

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) memberikan prioritas yang tinggi terhadap berbagai reformasi penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, manajemen sektor publik yang lebih baik, pembinaan

kelembagaan dan pemberantasan korupsi (Bastian, 2009:57). Beberapa peraturn terkait dengan pengadaan barang dan jasa sektor publik adalah:

a. UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari olusi, korupsi dan nepotisme .
b. UU No 5 Tahun 2000 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat
c. Keppres 80 tahun 2003 yang diperbarui Keputusan Presiden No 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. UU ini merupakan implementasi dari UU No 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. UU tersebut secara tegas dan jelas mengatur prosedur pengadaan barang/jasa termasuk pembinaan dan pengawasannya.
d. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655)
f. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering

Tujuan peraturan tersebut adalah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dalam jumlah cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dalam waktu dan tempat tertentu secara efektif dan efisien menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku (Bastian, 2009:58).

C. Efesiensi

1. Konsep Efesiensi

Efisiensi diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau dalam pandangan matematika didefinisikan

sebagai perhitungan rasio output dan atau input atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari suatu masukan yang digunakan.

Ada 3 faktor yang menyebabkan efisiensi yaitu:

a. Apabila dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar.
b. Input yang lebih kecil menghasilkan output yang sama.
c. Dengan input yang lebih besar dapat menghasilkan output yang lebih besar lagi.

Menurut Fareel (1962: 120) efisiensi suatu perusahaan terdiri dari dua komponen yaitu efisiensi teknik dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknik merupakan hubungan operasional dalam aktivitas mengonversi input menjadi output. Suatu perusahaan dikatakan efisien secara teknik apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan sumber daya (input) tertentu atau menghasilkan output tertentu dengan sumber daya (input) minimal. Sedangkan efisiensi alokatif mencerminkan kemampuan perusahaan menggunakan input yang proporsional dengan memperhatikan biaya atas input dimana kombinasi input dengan biaya terendahlah yang dipilih. Hampir sama dengan perusahaan, efisiensi dalam perbankan juga diartikan sebagai suatu tolak ukur dalam mengukur kinerja bank dimana efisiensi merupakan jawaban atas kesulitan dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja seperti tingkat efisiensi alokasi, teknis maupun total efisiensi.

Ada dua tipe efisiensi, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, sedangkan efisiensi teknis dilihat dari sudut pandang mikro ekonomi. Efisiensi teknis pada dasarnya menyatakan hubungan antara input dan output dalam suatu

proses produksi. Suatu proses produksi dikatakan efisien jika pada penggunaan input sejumlah tertentu dapat dihasilkan output maksimal, atau untuk menghasilkan sejumlah output tertentu digunakan input yang paling dibanding dengan efisiensi teknik. Dalam efisiensi ekonomi perusahaan harus memilih tingkatan input atau output dan kombinasinya untuk mengoptimalkan tujuan ekonomi, biasanya dengan meminimalisasi biaya atau memaksimalisasi keuntungan. Dalam penelitian ini konsep efisiensi yang digunakan adalah efisiensi teknis.

2. Efisiensi Pengadaan Barang dan jasa Melalui Sistem LPSE

Efisiensi merupakan pencapaian sebuah sasaran akhir dengan memakai jumlah sumber daya yang paling sedikit (Heinz dan Harold dalam Gusway, 2007:2). Efisien adalah melakukan dengan benar (Drucker dalam Gusway, 2007:3). Efisien adalah cara-cara dalam mencapai tujuan kita hanya membutuhkan sumber daya sesedikit mungkin (Gusway, 2007:3).

Dapat dikatakan bahwa untuk menjadi efisien berarti mengambil sesuatu sedikti dan lebih murah menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Untuk mengukurnya maka perlu difahami mengenai kriteria efisiensi. Kriteria efisiensi adalah melihat pengaruh utama keputusan organisasi atas anggota dari suatu administrasi perusahaan ditentukan apakah perintah dipatuhi sebagai fungsi utama dalam proses penilaian (Anzizhan, 2004:44).

Kriteria tidak efisien suatu sistem menurut Fatta (2009:52) yaitu:

a. Banyak waktu yang terbuang pada aktivitas sumber daya manusia, mesin atau komputer
b. Data diinput atau disalin secara berlebihan
c. Data diproses secara berlebihan

d. Informasi dihasilkan secara berlebihan
e. Usaha yang dibutuhkan untuk tugas-tugas terlalu berlebihan
f. Material yang dibutuhkan untuk tugas-tugas terlalu berlebihan.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 153/M-IND/PER/12/2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Perindustrian, Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sebagaimana ketentuan dalam pasal 131 ayat (1) bahwa pada tahun 2012 K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan. Peraturan tersebut juga mengatur Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Kementrian perindustrian, 2015)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini adalah E-Tendering yaitu tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada Sistem

Pengadaan Secara Elektronik dengan menyampaikan 1 (satu) penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Tata cara ETendering, syarat dan ketentuan serta panduan pengguna (user guide) diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu di dalam SPSE juga telah disiapkan fasilitas untuk proses audit secara online (EAudit), Katalog Elektronik (E-Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah dan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (E-Purchasing). (Kementrian perindustrian, 2015)

D. Elektronik *Governance*

1. Pengertian *Elektronic Government*

E-government menjadi sangat popular sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology* - ITC). Berbagai Negara di blahan dunia berlomba menerapkan e-government dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing-masing, yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja dan menejemen pelayanan public pemerintahan sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya (Indrajit,2002: 3-4). The world bank group dikutip oleh Indrajit (2004:14) mendefinisikan *E-Government sebagai the use by government agencies of information technologies* (*such as Wide Area Netwoks, the Internet, and mobile computing*) *that have the abilty to transform relations with citizens,*

businesses, and other arms of government. Sementara Pemerintah Federal Amerika Serikat mengungkapkan bahwa E-Government mengacu kepada penyampain informasi dan pelayanan online pemerintah melalui internet atau dunia digital lainnya. Secara bebas dapat dikemukakan bahwa E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.

Menurut WYLD (2004) dalam Akadun (2009:131), e-government merupakan pemrosesan secara elektronik yang digunakan pemerintah untuk mengkomunikasikan, menyebarkan atau mengumpulkan informasi sebagai fasilitas transaksi dan perizinan dalam satu tujuan. Caldow dalam Indrajit (2006) mengatakan bahwa e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan murah, dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dngan cara menyediakan sarana publik sehingga mudah mendapatkan informasi, dan menciptakan pemerintahan yang baik. Selanjutnya menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), e-governmnt merupakan:

> "penggunaan teknologi berdasarkan web (jaringan), komunikasi internet, serta aplikasi interkoneksi sehingga terdapat fasilitas komunikasi dan memperluas akses pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik internasional maupun antara negara. Selain itue-government juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas kinerja dan proses pelaksanaan layanan beserta tugas pokok dan fungsinya" (LAN, 2003: 444)

2. Manfaat *Elektronic Government*

Negara-negara maju berpandangan bahwa implementasi E-government yang tepat dapat memperbaiki kualiatas kehidupan masyarakat di suatu

negara, termasuk masyarakat dunia secara umum. Berikut beberapa manfaat diterapkannya *E-government* bagi suatu negara menurut Indrajit (2002: 5), yaitu:

a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stekeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep good corporate governance.
c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakehodernya untuk keperluan aktifitas sehari-hari.
d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada.
f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain mitra pemerintahan dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Lebih lanjut Hardiansyah (2011: 111) mengungkapkan secara garis besar *E-government* memiliki banyak keuntungan antara lain:

a. Peningkatan kualitas pelayanan, pelayanan publik dapat dilakukan selama 24 jam berkat adanya teknologi internet.
b. Dengan menggunakan teknologi online, banyak proses yang dapat dilakukan dalam format digital, hal ini akan banyak mengurangi penggunaan kertas, dan proses akan menjadi lebih efisien dan hemat.
c. Database dan proses terintegrasi, akurasi data akan lebih tinggi, mengurangi kesalahan identitas dan lain-lain.
d. Semua proses dilakukan secara transparan, karena semua proses berjalan secara *online*.

Sedangkan menurut Retnowati (2008) bahwa manfaat *E-government* adalah,

a. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan komunitas negara lainnya.
b. Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintah.

c. Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan.
d. Menciptakan masyarakat berbasis komunikasi informasi yang lebih berkualitas.

Lebih lanjut Habibullah (2010) menjelaskan bahwa manfaat E-government meliputi,

a. Meningkatkan efisiensi pemerintahan.
b. Memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.

3. Jenis-Jenis Pelayanan Pada *Electronic Government*

Indrajit (2004: 47) menyebutkan bahwa implementasi ada beragam tipe pelayanan yang ditawarkan pemerintah dengan mengusung konsep E-Government. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis dari pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama:

a. Aspek Kompleksitas yaitu aspek yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi *e-government* yang ingin dibangun dan diterapkan.
b. Aspek Manfaat yaitu aspek aspek yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan para penggunanya.

Berdasarkan dua aspek tersebut maka jenis-jenis pelayanan *E-Government* dapat dibagi menjadi 3 kelas utama (Indrajit 2004: 47), yaitu:

a. Publish

Jenis ini merupakan implementasi e-government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebnyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam kelas publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh

masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Biasanya kanal akses yang dipergunakan adalah komputer atau *handphone* melalui medium internet, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs (website) departemen atau divisi lain yang terkait dimana kemudian user dapat melakukan browsing melalui link yang ada terhadat data atau informasi yang dibutuhkan. Contoh *e-Government* didalam kelas ini adalah dimana masyarakat dapat melihat dan mengunduh berbagai produk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang diterapkan oleh lembaga-lembaga legislatif (DPR), eksekutif (Presiden dan Kabinet), maupun yudikatif (Mahkamah Agung).

b. Interact

Berbeda dengan kelas Publish yang sifatnya pasif, pada kelas Interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang bisa digunakan: pertama, adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi yang secara spesifik (pada kelas Publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Kedua, pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan baik secara langsung (seperti *chatting, teleconference, web-tv*, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui email, *frequent ask questions, newletter*, mailing list, dan lain sebagainya). Contoh implementasinya adalah konsep

telemedecine dimana pasien dapat berkomunikasi gratis dengan dokter melalui keluhan penyakit yang dideritanya melalui web-tv.

c. Transact

Pada fase transact terjadi interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya system keamananyang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindung dengan baik. Contoh aplikasinya adalah aplikasi e-procurenment, rangkain proses tender proyek-proyek pemerintah dapat dilakukan secara *online* melalui internet.

Selain memperlihatkan dimensi kompleksitas dan manfaat, klasifikasi ini dapat pula dilakukan sebagai panduan evolusi grandual dari sebuah inisiatif *e-Government*. Dalam arti kata departemen, divisi, atau unit tertentu dapat secara perlahan-lahan mengembangkan program e-Government-nya dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih. Klasifikasi yang sama dapat pula dipergunakan untuk melakukan manajemen portopolio sebagai aplikasi e-government di sebuah unit. Maksudnya adalah bahwa berdasarkan tingkat resiko, manfaat, kompleksitas pembiayaan, dan kebutuhan sumber daya, pemerintah dapat

menyeleksi proyek-proyek *e-Government* mana saja yang harus dilakukan dan mana yang harus ditundah pelaksanaannya.

4. Prinsip Pelaksanaan dan Pengembangan *Electronic Government*

Dalam penerapan *Electronic Government* perlu diperhatikan juga prinsip-prinsip electronic government agar pelaksanaannya memberikan manfaat secara optimal. Indrajit (2002: 11) mengungkapkan bahwa, ada empat prinsip *electronic government*, yaitu:

a. Fokuslah pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena begitu banyaknya jenis pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya, maka harus dipikirkan pelayanan mana saja yang menjadi prioritas.
b. Bangunlah lingkungan yang kompetitif. Yang dimaksud dengan lingkungan yang kompetitif adalah bahwa misi untuk melayani masyarakat tidak hanya diserahkan, dibebani, atau menjadi hak dan tanggung jawab institusi publik (pemerintah) semata, tapi sektor swasta dan non komersial diberikan pula kesempatan untuk melakukannya.
c. Berikan penghargaan pada inovasi, dan berikan ruang kesempatan bagi kesalahan. Konsep E-Government merupakan sebuah pendekatan yang masih baru, dimana sebuah bangsa dan negara sedang melakukan eksperimen dengannya. Adalah merupakan suatu hal yang normal apabila dari sedemikian banyak program dan portofolio E-Government di satu sisi diketemukan keberhasilan sementara di lain pihak kerap dijumpai kegagalan atau di satu pihak terlihat banyak sekali pihak yang mendukung sementara di pihak lain yang menentang juga tidak sedikit.
d. Tekankan pada pencapaian efisiensi. Pemberian pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital atau internet tidak selamanya harus menjadi jalur alternatif mendampingi kanal konvensional karena pada saatnya nanti, terutama setelah mayoritas masyarakat terbiasa menggunakan kanal digital, jalur tradisional harus dihapuskan agar pemerintah menjadi sangat efesien.

Lebih lanjut SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam Habibullah (2010) menyebutkan setidaknya ada tujuh aspek esensial dalam pengembangan *E-Government* yang meliputi,

a. Menejemen dan Organisasi, menyangkut suatu unit organisasi dalam pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kompetensi yang diperlukan untuk mendesain dan mengelolah E-government.
b. Penggunaan teknologi, menyangkut tentang infestasi penting untuk membuat jaringan infrastruktur, sistem komputer dan sumber daya manusia untuk mendukung E-government dan jugaperangkat lunak yang akan digunakan (*soft, hard, brainware*).
c. Operasi internal, menyangkut aplikasi-aplikasi untuk operasi internal yang sesuai kebuthan dan kejelasan operasi manajerial. Operasi internal ini sebenarnya memegang kunci pokok dalam kinerja E-government secara keseluruhan. Hal ini karena biaya, waktu, dan orang akan sangat sangat mempengaruhi kinerja *E-government* setelah tercipta.
d. Pelayanan dan transaksi, adalah pemberian layanan dan penerimaan hak atas layanan yang dilakukan secara electronic.
e. Partisipasi dan komunikasi masyarakat, adalah apakah aplikasi dapat diamati dan digunakan oleh masyarakat (*government to community*).
f. Komunikasi pemerintah dengan pemerintah, adalah aplikasi E-government dapat berhubungan antar pemerintah (*government to government*) dalam pertukaran informasi.
g. Isu kebijakan, adalah apakah *E-government* dapat menempatkan privacy masyarakat, menjamin keamanan diri pengguna informasi, dan penentuan besar biaya dari setiap transaksi.

Beberapa prinsip diatas merupakan landasan utama yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan E-government pada suatu negara agar tercipta penyelenggaran yang baik.

5. **Dimensi Kualitas Pelayan *E-government***

Kualitas pelayanan publik merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh penyedia layanan yang digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yang berhubungan dengan produk, jasa, dan proses yang memenuhi atau melebihi harapan. Untuk mengukur kualitas pelayanan *e-government*. Menurut Pratiwi, Widowati dan Rihandoyo (2013), dimensi-dimensi yang dapat digunakan yakni, dimensi *tangible assurance*, transparansi, akuntabilitas, patisipasif, *efektiveness*, dan *responsiviness*.

1. Dimensi *Tangible*, dengan melihat Penampilan Website LPSE, kemudahan memahami fitur-fitur LPSE, penggunaan alat bantu dalam pelayanan, dan pembaruan informasi.
2. Dimensi *assurance*, dengan melihat Jaminan biaya LPSE, jaminan legalitas dalam pelayanan, jaminan keamanan dan kerahasiaan dokumen, jaminana waktu dalam pelayanan
3. Dimensi transparansi, adanya keterbukaan dalam pelayanan serta mudah dan dapat diakses semua pihak.
4. Dimensi akuntabilitas, Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, mengurangi tingkat kecurangan.
5. Dimensi patisipasif, Mendorong peran serta masyarakat, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
6. Dimensi efektiveness, Adanya persaingan sehat, mengurangi biaya pelaksanaan, dan efisiensi waktu pelaksanaan.
7. Dimensi responsiviness, Pelayanan yang cepat, pelayanan yang cermat, dan pelayanan terhadap keluhan pengguna.

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dalam bentuk jasa, barang, dan administratif dalam rangka melayani pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat maka upaya memaksimalkan pelayan telah dilakukan, dimana salah satunya yaitu dengan kualitas pelayanan melalui *e-government*. Pelayanan publik tersebut diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan dalam memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dasar dan pelayanan umum.

E. *New Public Management* (Manajemen Publik Baru)

1. Alasan Munculnya Teori Manajemen Publik

a. Administrasi Publik tradisional telah gagal mencapai tujuannya secara efektif dan efisien sehingga perlu diubah menuju orientasi yang lebih memusatkan perhatian pada pencapaian hasil kinerja dan akuntabilitas.
b. Adanya dorongan yang kuat untuk mengganti tipe birokrasi klasik yang kaku menuju kondisi organisasi publik, kepegawaian, dan pekerjaan ke arah yang lebih fleksibel.
c. Perlunya menetapkan tujuan organisasi dan pribadi secara lebih jelas dan ditetapkannya tolak ukur keberhasilan kinerja melalui indicator kerja.
d. Perlunya para pegawai senior memiliki komitmen politik pada pemerintah daripada sekedar bersikap netral atau nonpartisipan.
e. Fungsi-fungsi yang dijalankan pemerintah hendaknya lebih disesuaikan dengan tuntutan dan sinyal pasar.
f. Adanya kecenderungan untuk mereduksi peran dan fungsi Pemerintah dengan melakukan kontrak kerja dengan pihak lain dan privatisasi.
g. Keenam alasan tersebut di atas, ditambahkan oleh Martin Minogue (2000) dengan menyebut adanya 3 tekanan yang menyebabkan perlu adanya perubahan paradigma menuju ke Public management yaitu:
    1) Semakin membesarnya anggaran pemerintah
    2) Rendahnya mutu kinerja pemerintah
    3) Adanya nilai ideologi yang bersifat konfiktif terhadap perubahan paradigma pemerintahan.

2. Pengertian Public Management dan *New Public Management*

Pada dasarnya public management, yaitu instansi pemerintah menurut Overman dalam Keban (2004:85), mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “scientific management”, meskipun sangat dipengaruhi oleh “scientific management”. Public management adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. Manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang

administrasi publik yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya secara jelas maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.

Doktrin utama Public Management adalah :

a. Fokus utamanya pada aktivitas manajemen, penilaian kinerja dan efisiensi, bukan pada kebijakan;
b. Memecah birokrasi publik ke dalam agensi-agensi (unit-unit) dibawah yang terkait langsung dengan pemakai pelayanan;
c. Pemanfaatan „pasar-semu" dan „kontrak kerja" untuk menggalakkan persaingan;
d. Pengurangan anggaran pemerintah;
e. Penggunaan gaya manajemen yang lebih menekankan pada sasaran akhir, kontrak jangka pendek, insentif anggaran, dan kebebasan melaksanakan manajemen.

Berdasarkan hal-hal di atas maka Public Management dapat diartikan sebagai bagian yang sangat penting dari administrasi publik (yang merupakan bidang kajian yang lebih luas), karena administrasi publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen pemerintahan saja tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada lembaga-lembaga publik. Dan Public Management berkaitan dengan fungsi

dan proses manajemen yang berlaku baik pada sector publik (pemerintahan) maupun sektor diluar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung (*nonprofit sector*). Organisasi publik melaksanakan kebijakan publik. Public Management memanfaatkan fungsi-fungsi : perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik, maka berarti ia memfokuskan diri pada the managerial tools, techniques, knowledges and skills yang dipakai untuk mengubah kebijakan menjadi pelaksanaan program.

New Public Management (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean management. NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.

NPM ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi menurut Ferlie, Ashbuerner, Filzgerald dan Pettgrew dalam Keban (2004 : 25), yaitu:

a. Orientasi The Drive yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.
b. Orientasi Downsizing and Decentralization yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan

otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat.

c. Orientasi in Search of Excellence yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Orientasi Public Service yaitu menekankan pada kualitas, misi dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi "user" dan warga masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka menekankan "social learning" dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

Pelajaran penting yang dapat diambil dari NPM ini adalah bahwa pembangunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, harus lebih bersifat mengarahkan (steering) dari pada menjalankan sendiri (rowing), harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif, dan memekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wirausaha dan pencapaian hasil ketimbang budaya taat asas, orientasi pada proses dan input (Rosenbloom & Kravchuck, 2005).

3. Karakteristik dan Prinsip *New Public Management*

M.Minougue (2000) paling tidak menyebut adanya 5 karakteristik utama Public Management, yaitu:

a. *A separation of strategic policy from operational management*. Public management lebih banyak terkait dengan tugas-tugas operasional pemerintahaan dari pada peran perumusan kebijakan.

b. *A concern with results rather than process and procedure*. Public management lebih berkonsentrasi pada upaya mencapai tujuan daripada upaya berkutat dengan proses dan prosedur.

c. *An orientation the needs of customer rather than those of bureaucratic organizations.* Public management lebih banyak berorientasi pada pemenuhan kebutu dari pada kebutuhan birokrasi.

d. *A withdrawal from direct service provision in favour of a steering or enabling role*. Public management menghindarkan diri dari berperan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan peran utamanya memberikan arahan saja atau pemberdayaan kepada masyarakat.

e. *A trans formed bureaucratic culture/ A change to entrepreneurial management culture.* Public management mengubah diri dari budaya birokrasi.

Prinsip *New Public Management*

1) Lebih berfokus pada manajemen, bukan kebijakan.
2) Adanya standar yang jelas dan dilakukannya pengukuran terhadap kinerja yang dicapainya.
3) Penekanan yang lebih besar pada pengendalian atas hasil (output), bukan pada prosedur.

4) Pergeseran ke arah adanya tingkat persaingan yang lebih besar di dalam sektor pelayanan publik.
5) Penekanan pada pengembangan pola-pola manajemen sebagaimana yang dipraktikan pada sektor swasta untuk mendukung perbaikan kinerja pelayanan publik.
6) Adanya pergeseran ke arah pemecahan ke dalam berbagai unit organisasi yang lebih kecil dalam sektor pelayanan publik.
7) Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan parsimony dalam penggunaan sumber daya.

4. Tujuan Manajemen Publik

Tujuan dari Public Management adalah:

a. Menurut Rainey (1990): public management aims to achieve skills and improve skills and improve accountability" Manajemen publik itu ditujukan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik (lebih efektif dan efisien), pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.
b. Menurut Graham & Hays (1991): "public managemen are concerned with efficiency,accountability,goal achlevement and dozen of other managerial and technical question", Manajemen publik itu bertujuan untuk menjadikan sector public lebih efisien, akuntabel, dan tujuannya tercapai serta lebih mampu menangani berbagai masalah manajerial dan teknis.

c. Tujuan umum New Public Management : Efektivitas, efisiensi dan ekonomisasi sektor publik, Kualitas dan kuantitas out put sektor publik dan Pemerintahan yang berdaya hasil.

5. Kritik terhadap Penerapan NPM

Kritik Terhadap NPM :

a. Adanya perbedaan besar antara kekuatan pasar dan kepentingan masyarakat.
b. Masyarakat dianganggap hanya sebagai konsumen semata menyebabkan masyarakat dijauhkan hakikatnya dari partisipasi.

Akibatnya :

a. Terjadi krisis identitas pada sektor publik,
b. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah,
c. Restrukturisasi hubungan masyarakat dengan pemerintah dalam pelayanan publik. Di negara-negara berkembang NPM dipengaruhi oleh world bank, UNDP, IMF,OECD.

Masalah penerapan NPM dinegara berkembang:

a. NPM menerapkan mekanisme pasar atas kebijakan publik sehingga kurang tepat diterapkan dinegara berkembang karena pengalamnnya tentang ekonomi pasar masih sedikit,
b. Permasalahan privatisasi perusahaan-perusahaan publik,

c. Perubahan birokrasi ke mekanisme pasar apabila tidak hati-hati akan mengakibatkan korupsi,
d. Adanya permasalahan kelembagaan,
e. Adanya keengganan untuk berpindah kemodel pengontrakan dalam pemberian pelayanan publik jika aturan hukum dan penegakannya tidak kuat.

F. Penelitian terdahulu

Udoyono (2012) melakukan penelitian dengan judul E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. Tesis ini mengkaji tentang implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik. E-Procurement merupakan terobosan dalam pelayanan publik untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Objek penelitian ini adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kota Yogyakarta Tahun 2009. Metode yang digunakan dalam tesis ini yaitu studi kasus. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi dokumen. Temuan dari tesis ini adalah Pertama, dimensi fisibilitas dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kota Yogyakarta tahun 2009 meliputi regulatif, teknokratis dan administratif, politik, dan kebutuhan masyarakat. Kedua, dimensi akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kota Yogyakarta tahun 2009 meliputi meliputi regulatif, politik, dan keuangan. Dengan demikian, implementasi *E-Procurement* di Kota Yogyakarta tahun 2009 fisibel tapi tidak akuntabel.

Pratiwi, Saleh, dan Wahid (2008) melakukan penelitian Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Procurement (Studi Pada Layanan Pengadaan Secara elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri). Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Procurement (Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri). Penelitian ini berawal dari pentingnya akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem elektronik (*e-procurement*). Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mewajibkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan sistem elektronik (E-Procurement) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian dan Pemerintah Daerah. Salah satunya yaitu LPSE Pemerintah Kabupaten Kediri yang sudah menerapkan sistem e-procurement sejak 2011 dan hasilnya akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional LPSE Kabupaten Kediri belum sepenuhnya akuntabel karena masih ditemukan faktor penghambat yaitu tidak ada pertemuan langsung antara admin dan rekanan, kapasitas jaringan yang terbatas dan kurangnya tenaga ahli dalam bidang IT.

Wahyuningsih, Kusuma dan Martoyo (2013) melakukan penelitian dengan judul Impelementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BP2AMKB) Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor

yangmenghambat dalam penyediaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui proses penunjukan langsung dengan pagu dana di bawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan masih belum optimal dikarenakan belum terealisasinya pelaksanaan pengadaan melalui Penunjukan Langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pelaksanaannya. Kurangnya pemahamanbaik dari pihak pegawai dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat maupun penyedia barang/jasa atau rekanan mengenai Pengadaan Barang/Jasa melalui Proses Penunjukan Langsung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan pagu dana dibawah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), sehingga realisasi anggaran tidak tepat waktu dan mempengaruhi kinerja kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat. Analisis data mendeskripsikan bahwa, belum optimalnya pengadaan barang/jasa melalui proses penunjukan langsung di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat diakibatkan beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain: sumber daya manusia, sumber daya financial, sumber daya wewenang, sumber daya informasi tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 .

G. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran disajikan dalam bentuk skema sederhana dimana variabel Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang meliputi dimensi *tangible*, *assurance*, transparansi, akuntabilitas, partisipasif, *efektiveness*, dan *responsiviness* dan pengaruhnya terhadap efisiensi pengadaan barang barang dan jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang). Kerangka pikir penelitian digunakan sebagai alur penelitian yang akan dilakukan, melalui kerangka pikir tersebut maka diharapkan penelitian ini dapat terarah sesuai dengan tujuan akan dicapai.

Gambar 1

Model Kerangka Hipotesis

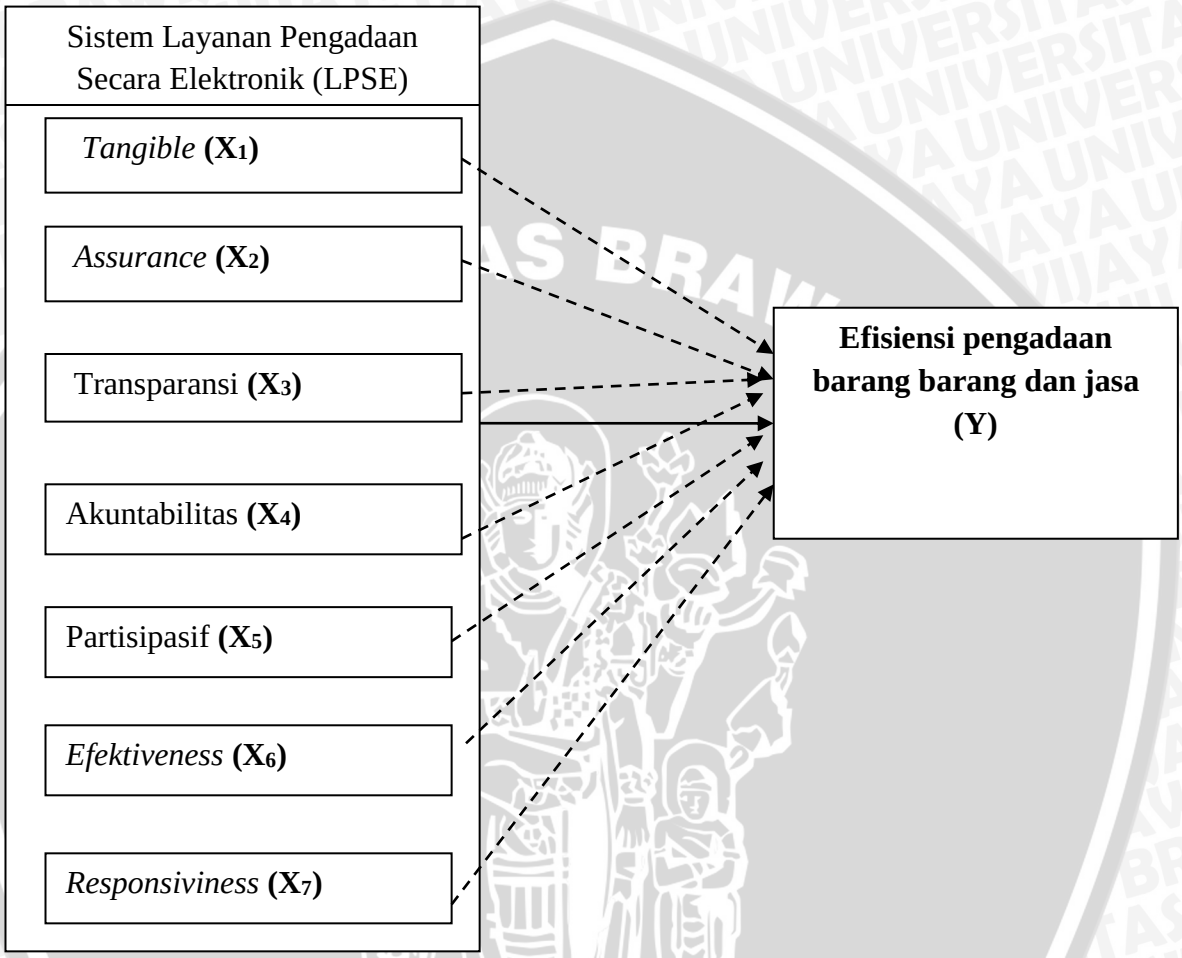

Sumber: Peneliti, 2012

Keterangan:

——→ : menunjukkan pengaruh secara simultan terhadap variabel Y

- - - -→ : menunjukkan pengaruh secara parsial terhadap variabel Y

H. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan yang diperoleh dari penyusunan kerangka pikiran, berupa proposisi yang deduksi. Merumuskan hipotesis berarti membentuk proposisi yang sesuai dengan kemungkinan-kemungkinannya serta tingkat-tingkat kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran maka dihipotesiskan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh secara parsial Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang meliputi dimensi *tangible assurance*, transparansi, akuntabilitas, patisipasif, *efektiveness*, dan *responsiviness* terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang)
2. Terdapat pengaruh secara simultan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang meliputi dimensi *tangible assurance*, transparansi, akuntabilitas, patisipasif, *efektiveness*, dan *responsiviness* terhadap efisiensi pengadaan barang barang dan jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa angka-angka. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. (Singarimbun, 1995:3).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan objek atau subjek yang terdapat pada suatu wilayah dan memenuhi persyaratan tertentu dalam masalah penelitian (Riduwan, 2008:55). Populasi merupakan wilayah generalisasi yang mencakup objek maupun subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik

sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010:115). Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan bagian pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang.

2. Sampel

Menurut Arikunto (2006:131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel diambil jika peneliti merasa tidak mampu meneliti seluruh populasi. Peneliti menggunakan metode *Probability sampling*, yaitu metode yang dipergunakan untuk memilih dan mengambil unsur-unsur atau anggota-anggota populasi untuk digunakan sebagai sampel yang representatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *total sampling* merupakan prosedur sampling yang menggunakan seluruh populasi pada penelitian (Singgih dan Tjiptono, 2000:90).

D. Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran

1. Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,2008:38). Kerlinger dalam Sugiyono (2010:58) menyatakan bahwa variabel adalah konstruk *(constructs)* atau sifat yang akan dipelajari. Dibagian lain Kerlinger menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda

(different values). Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (X), variabel dependen (Y). Pada bagian ini akan diuraikan masing-masing variabel tersebut sebagai berikut:

a. Variabel Independen (X)

Pada penelitian ini variabel bebas meliputi dimensi *tangible*, *assurance*, transparansi, akuntabilitas, partisipasif, *efektiveness*, dan *responsiviness* yang didefinisikan sebagai berikut:

1) *Tangible* (X_1)

   Dengan melihat Penampilan Website LPSE, kemudahan memahami fitur-fitur LPSE, penggunaan alat bantu dalam pelayanan, dan pembaruan informasi

2) *Assurance* (X_2)

   Dengan melihat Jaminan biaya LPSE, jaminan legalitas dalam pelayanan, jaminan keamanan dan kerahasiaan dokumen, jaminana waktu dalam pelayanan

3) Transparansi (X_3)

   Adanya keterbukaan dalam pelayanan serta mudah dan dapat diakses semua pihak

4) Akuntabilitas (X_4)

   Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, mengurangi tingkat kecurangan

5) Partisipasif (X_5)

Mendorong peran serta masyarakat, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat

6) *Efektiveness* (X_6)

Adanya persaingan sehat, mengurangi biaya pelaksanaan, dan efisiensi waktu pelaksanaan

7) *Responsiviness* (X_7)

Pelayanan yang cepat, pelayanan yang cermat, dan pelayanan terhadap keluhan pengguna.

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel terikat, output, kriteria, konsekuen atau konstruk endogen (*endogen construct*). Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas atau variabel terikat. Pada penelitian ini yang termasuk variabel terikat adalah efisiensi pengadaan barang barang dan jasa (Y) yaitu pencapaian sebuah sasaran akhir dengan memakai jumlah sumber daya yang paling sedikit.

c. Skala Pengukuran

Skala yang digunakan dalam pengukuran variabel adalah skala *likert*. Skala *likert* adalah suatu cara yang sistematis untuk memberi penilaian pada indeks. Salah satu cara yang paling seseorang responden dengan sebuah pertanyaan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban : Sangat setuju, Setuju, Cukup setuju, Tidak setuju, dan Sangat

tidak setuju. Jawaban ini di beri skor 1 smpai 5 (Singarimbun dan Effendi, (2006 :111). Setiap pertanyaan yang ditujukan kepada responden merupakan pertanyaan interval suatu konsisten sikap dan dinilai dengan jawaban yang diberikan, dengan menggunakan skala pengukuran seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

Penentuan Skor Jawaban Responden

No	Jawaban responden	Kode	Skor
1	Sangat setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Cukup stuju / ragu ragu	R	3
4	Tidak setuju	TS	2
5	Sangat tidak setuju	STS	1

E. Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, diperoleh langsung dari responden yang meliputi data deskripsi identitas responden, daftar pertanyaan mengenai pendapat pengguna mengenai item-item yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode penelitian karena data yang diperoleh ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memudahkan peneliti mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini, data diperoleh dari lapangan dengan menggunakan

kuesioner. Menurut Hadjar (1999:181) dalam Taniredja dan Hidayati (2011:44), kuesioner merupakan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu yang diberikan kepada subyek, baik secara individual atau kelompok, untuk mendapatkan informasi terentu, seperti preferensi, keyakinan, minat dan perilaku. Untuk mendapatkan informasi, peneliti tidak harus bertemu subyek, tetapi cukup dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis.

F. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Tahapan analisis data yang akan dilakukan dengan menggunakan computer SPSS 16 *for windows*.

1. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Menurut Widayat (2004:87) validitas adalah "suatu pengukuran yang mengacu pada proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari kesalahan sistematis dan kesalahan random". Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada penelitian ini, digunakan validitas *Pearson* berdasarkan rumus korelasi *product moment*. Adapun kriteria pengujiannya adalah:

Apabila $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka tidak terdapat instrumen yang valid pada tingkat kepercayaan 95% dan apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ terdapat instrumen yang

valid pada tingkat kepercayaan 95% atau dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Nilai r hitung dapat diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n.\sum XY - (\sum X).(\sum Y)}{\sqrt{n.\sum X^2 - (\sum X)^2}.\sqrt{n.\sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Dimana:

r = Koefisien Korelasi

n = Jumlah sampel

X = Skor tiap butir

Y = Skor Total

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrumen tersebut dapat diberikan hasil yang relatif sama bisa dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. Suatu instrumen yang mempunyai reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki kehandalan untuk digunakan suatu pengukuran. Suatu alat ukur yang baik tidak berubah-rubah pengukurannya, artinya meskipun alat itu digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang hampir serupa.

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode konsistensi internal dengan teknik Reliabilitas Alpha, (Rangkuti, 2004:76). Dengan rumus sebagai berikut:

$$= \quad \alpha \qquad \left[\frac{k}{k-1}\right] \quad \left[1 - \frac{\sum \sigma_j^2}{\sigma_x^2}\right]$$

Dimana :

a = nilai realibilitas alat ukur

k = jumlah item 1 pertanyaan

s_j^2 = Varian belahan j; j= 1,2,…..k

s_x^2 = Varians skor tes

σ_j^2 = jumlah varian masing-masing item

σ_x^2 = varians total

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas instrumen di atas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel. Sebaliknya jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 atau 60% berarti tidak terdapat data yang reliabel.

2. **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencangkup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, maka dilakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan bantuan program SPSS 16 *for windows.*

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini peneliti mendeteksi normalitas data dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* yang nantinya akan dipadukan dengan kurva *Normal Q-Q Plots*. Menurut Akbar (2005) *Kolmogorov-Smirnov* adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui distribusi suatu data untuk data yang minimal bertipe ordinal. Ketentuan

pengujian ini adalah jika Sig. atau signifikansi atau nilai probabbilitas > 0,05 distribusi adalah normal (Santoso, 2006).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011). Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan nilai *VIF (Variance Inflation Factor).* Menurut Wijaya (2011) multikolinearitas dapat dilihat dari VIF, jika VIF < 10 maka tingkat kolinieritas dapat ditoleransi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Ghozali (2001), menyebutkan ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas: yaitu dengan melihat *Grafik Plot* antara nilai prediksi variabel terikat. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang

jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi homoskedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari lebih dari satu variabel bebas (Sugiyono, 2011). Oleh karena itu, model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Keterangan :

Y	= efisiensi pengadaan barang barang dan jasa
α	= Konstanta
$\beta_{1....}\beta_7$	= Koefisien regresi
X_1	=*Tangible*
X_2	=*Assurance*
X_3	= Transparansi
X_4	= Akuntabilitas
X_5	= Partisipasif
X_6	= *Efektiveness*
X_7	= *Responsiviness*
e	= *Erorr*

Dan untuk interpretasi hasil regresi adalah sebagai berikut :

1. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

   Uji-F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang ada di dalam model regresi berganda mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini mempunyai kriteria dalam pengambilan keputusannya yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungan (F_{hitung}) dengan F menurut tabel (F_{tabel}), apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka Ho ditolak dan Ha diterima (Ghazali, 2011).

2. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

   Uji-t ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini mempunyai kriteria dalam pengambilan keputusannya yaitu membandingkan nilai statistik *t* dengan statistik kritik menurut tabel. Apabila nilai statistik *t* hasil perhitungan (t_{hitung}) lebih tinggi nilai t menurut tabel (t_{tabel}), kita menerima hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghazali, 2011).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

   Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu.

R^2 = 0 (nol) berarti tidak ada pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

R^2 = mendekati 0 (nol) lemahnya pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

R^2 = mendekati 1 (satu) berarti kuatnya pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Rumah Sakit RSUD dr.Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang

Rumah Sakit Umum Daerah RSUD dr. Saiful Anwar atau bisa disebut RSSA adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. RSSA terletak di Kota Malang lawn Timur. RSSA telah diakreditasi sebagai rumah sakit kelas 'A' di Kota Malang, sehingga menjadi rumah sakit rujukan bagi rumah sakit lain di Jawa Timur. Sejarah awal RSSA ada sejak Perang Dunia Ke-II yang pada saat itu RSSA masih menjadi:.Rumah Sakit Militer Koninklijk*Nederlands-Indisch Leger* (KNIL).KNIL adalah tentara pada masa Hindia-Belanda yang sebagian besar anggotanya adalah penduduk pribumi.

Kemudian sejarahberlanjut masuk pada masa perang kemerdekaan RI, pada saat itu RumahSakit Celaket dipakai sebagai rumah sakit tentara, sementara untuk umumdigunakan Rumah Sakit Sukunyang ada dibawah Kotapraja Malang padasaatitu. Pada Tahun 1947 (saat agresi militer II), karena keadaan bangunan yang lebih baik den lebih muda,serta amok kepentingan strategi militer, Rumah SakitSukun diambil alih oleh tentara pendudukan dan dijadikan rumah sakit militer, sedangkan Rumah Skit Celaket dijadikan rumah sakit tentara.

Tanggal 14 September 1963, Yayasan Perguruan Tinggi Jawa Timur/ IDI membuka Sekolah Tinggi Kedokteran Malang dan memakai Rumah Sakit Celaket sebagai tempat praktek (Program Kerjasama STKM-RS Celaket tanggal 23 Agustus 1969).Tanggal 2 Januari 1974, dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.001/01/1974, Sekolah Tinggi Kedokteran Malang dijadikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dengan Rumah Sakit Celaket sebagai tempat praktek.

Pada tanggal 12 Nopcrnbcr 1979 otchGubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, sedangkan Rumah Sakit Celaket diresmikan sebagai Rumah Sakit G'mum Daerah Dr. Saiful Anwar.Keputusan Menteri Kesehatan RI No.51/Menkes/SKII/1979 tanggal 22 Pebruari 1979, menetapkan RSUD dr.SaifulAnwar sebagai rumah sakit rujukan. Pada bulan April 2047 dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.673/MENKES/SK/VI/2007 RSUD dr.Saiful Anwarditetapkan sebagai rumah sakit kelas A. Pada tanggal 30 Desember 2008 ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum dengan KcputusanGubernurProvinsiJawa Timur No.188/439/KPTS/013/2008. Pada tahun 2011 Rumah Sakit PedidikanUtama mendapatkan Akreditasi A.

2. Visi RSSA Malang

Menjadi Rumah Sakit Kelas Dunia Pilihan Masyarakat

Gambar 4.1

Bagan Struktur Organisasi
RSUD dr. Saiful Anwar Malang 2016

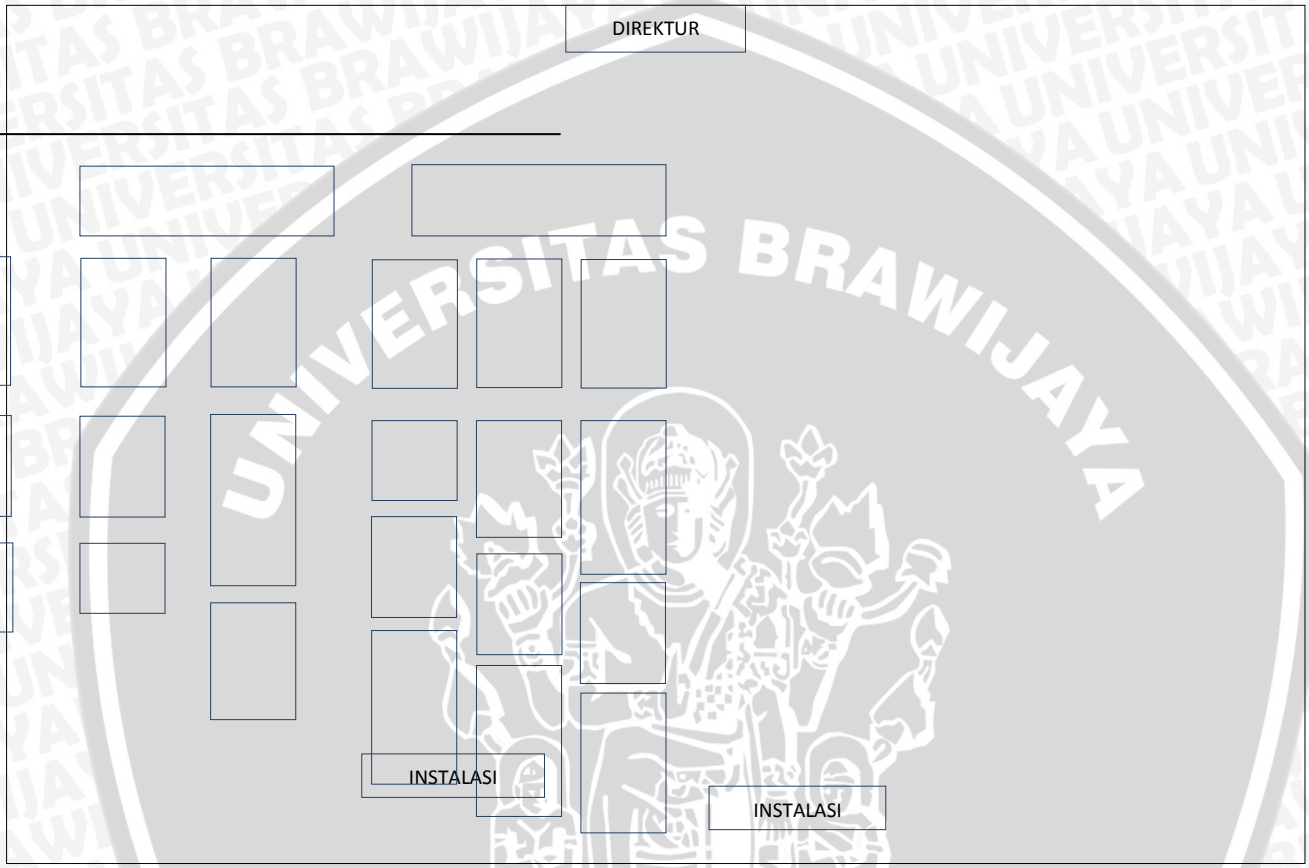

Sumber : rsusaifulanwar.jatimprov.go.id/struktur.html, 2016

c. Misi RSSA Malang

1) Menciptakan tata kelola rumah sait yang baik melalui penataan dan perbaikan manajemen yang berkualitas dunia, profesional serta akuntabel.

2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rumah sakit yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui pengembangan sistem pelayanan yang terintegerasi dan komprehensif

3) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan penelitian kesehatan melalui pengembangan mutu pendidikan dan penelitian berkualitas internasional.

4)Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan tenaga yang terlatih dan terdidik secara profesional.

d. Motto RSSA Malang

Kepuasan dan Keselamatan Pasien adalah Tujuan Kami.

e. Pedoman Sikap

5 S - SenyumSalamSapaSopanSantun

f. Seelogan

With Love We Service (Melayani dengan Cinta)

g. Komitmen Pelayanan

Lembaga ini sanggup memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan publik untuk mewujudkan kepuasan dan keselamatan pelanggannya.

h. Tugas, dan Fungsi Rumah Sakit

1) Penyelenggaraan Pelayanan Medik
2) Penyelanggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
3) Penyelanggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
4) Penyelanggaraan PelayananRujukan
5) Penyelanggaraan Usaha Pendidikan dan Pelatihan
6) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokterspesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya

7) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan
8) Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan
9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

i. Produk PclayananMedis RSSA

a) Instalasi Rawat Jalan
b) Instalasi GawatDarurat
c) Instalasi RawatInap
d) Instalasi Pelayanan Utama Graha PuspaHusada
e) Pelayanan Kamar Operasi
f) Pelayanan Pasien Intensif (Kritis)

3. Instalasi Rawat Jalan (IRJ) di RSSA

Instalasi Rawat Jalan merupakan salah satu produk pelayanan kesehatan yang ada di RSSA.Instalasi ini melayani pasien yang melakukan pengobatan secara berkala tanpa melakukan perawatan intensif yang harus menginap di rumah sakit.Di dalam pelayanannya, IRJ mempunyai beberapa produk pelayanan kesehatan berupa poliklinik-poliklinik yang menyediakan jasa peyalayanan kesehatan sesuai denganspesialisasi penyakit. Pelayanan jasa yang ada di IRJ antaralain:

1. Poliklinik Mata
2. Poliklinik Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)
3. PoliklinikBedah
4. Poliklinik Penyakit Dalam

5. Poliklinik Paru
6. PoliklinikSaraf
7. Poliklinik Jiwa
8. PoliklinikKomplementer
9. Poliklinik*Obgyn*
10. Poliklinik VCT
11. Poliklinik Anak
12. Poliklinik Gigi
13. Poliklinik Kulit dan Kelamin
14. Poliklinik Onkologi Bedah
15. Poliklinik General Check Up

Usaha untuk memberikan pelayanan yang dapat memberikan kenyamanan dan memenuhi kebutuhan yang diharapakan oleh pasien, IRJ memusatkan pengurusansegala yang dibutuhkan oleh IRJ dan seluruh Poliklinik yang ada di IRJ di BagianTata Usaha (TU) IRJ.Berikut struktur organsasi IRJ dalam menjalankan perannya di RSSA.

4. *Job Description* IsntalasiRawat Jalan di RSSA

Uraian tugas kepala instalasi, koordinator, kepala urusan &staf instalasi rawat jalan ini diurut dan dijelaskan dalam Surat keputusan (SK) Direktur RSUD dr. Saiful Anwar Malang 065/0888/302/2011 tentang Organisasi dan Tata Ketjalnstalasi di lingkungan RSUD dr. Saiful Anwar Malang.

5. Kepala Instalasi Rawat Jalan

Kepala Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas mengelolaberjalannyakegiatan Pelayanan MedikRawat Jalan, Pelayanan Keperawatan, Diklat &Pelatihan, dan Administrasi di lingkup Instalasi Rawat Jalan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur Pelayanan Medik& Perawatan. Hal yang harus dilakukan Kepala IRJ adalah sebagai berikut :

1) Menyusun rencana dan tersedianya program pengembangan pelayanan dari masing-masing Poliklinik
2) Meneliti kebenaran, ketepatan rencana program pengembangan Karyawan yang diusulkan dari Poli untuk disampaikan ke Management Rumah Sakit.
3) Meneliti dan menyetujui rencana program pengembanganKaryawan yang diusulkan dari Poll untuk disampaikan keManagemen Rumah Sakit.
4) Mengendalikan dan mengarahkan semua kegiatan Pelayanan lingkup IRJ sesuai Sistem Prosedur, Metode, Surat Keputusan (SK) Direktur, dan Peraturan Pemerintah.
5) Menetiti dan mengkoordinasikandengan PenanggunSlewabPelayanan Medis Poll terkait adanya SOP pelayanan media dantindakan medikdengan masa berlakunya 5 tahun.
6) Mengkaji dan mengesahkan penmintaan kebutuhan barang yang diperlukan dalam satu tahun.
7) Mengkaji dan mengesahkan penilaian kinerja dari personei yangada

dibawah tanggungjawabnya

8) Melaporkan kepada Direktur mengenai kinerja IRJdan peningkatan mutu pelayaan secara berkala.

9) Mengkomunikasikan Kebijakan dari SK Direktur PerdaProvinsi dan Peraturan Pemerintah kepada Koordinator, Kepala Urusanatau seluruh Karyawan

10) Mengadakan rapat-rapat internal datammenyepermasalahan yang timbul dalam pelayanan dan menyosiatisasikebijakan dan aturan baru.

6. **Koordinator PelayananMedik**

Koordinator pelayanan Medik adalah seorang dokterdalam organisasi yang mengoordinasikan semua kegiatan pelayanan medik dalam hubungan kerja dengan Penanggung Jawab MedikKlinik, Kepala Urusan

7. Kondisi Jumlah Karyawan IRJ RSSA

Pembagian karyawan di IRJ dibagi sesuai dengan tugas yang ada di IRJ.Pembagian tugas dibagi sesuai dengan bagian seperti yang dilihat pada Gambar 11.antara lain : Pekarya, Bidan, dan Pendorong. dijelaskan oleh Koordinator Administrasi IbuNanikKusnaeni bahwa, "Pekaryatugasnya tidak beda jauh dengan bagian administrasi, sedangkan bidanmasuk pada bagianperawat hanya saja mereka ditempatkan pada PoliOhgyndanPoliAnak.

Tabel 4.1

Jumlah Karyawan yang Bertugas di Setiap Poliklinik

No.	Nama	Jumlah Karyawan (orang)
1.	Bagian Tata Usaha (TU)	7
2.	Poli KOMPLEMENTER	5
3.	Poli Dalam	6
4.	Poli VCT	4
5.	Poli Kulit	3
6.	Poli Paru	4
7.	Poli Jantung	4
8.	PoliNeorologi	3
9.	Poli GCU	3
10.	PoliBedah	11
11.	Poli THT	5
12.	Poli Mata	5
13.	Poli IKA	6
14.	Poli OBG	8
15.	PoliBedahOnkoligi	8
16.	Poli Jiwa	2
17.	TenagaPadat Karya	8
18.	Tenaga Orientasi	8

Sumber : Tata Usaha IRJ, 2016

Tenaga pendorong ini bertugas untuk siaga pada pasien yang dirasa memerlukan bantuan kursi roda untuk mobilisasi dari tempat ke tempat.Karyawan-karyawan ini ditempatkan pada poli-poli dengan jumlah yang menyesuaikan kebutuhan poli.Jumlah tenaga kerja pada setiap poli dapat dilihat pada Tabel 9.Kebutuhan dokterspesialis dalam setiap poliklinik pun juga menyesuaikan dari kondisi kunjngan pasien, klarena selain harus praktek di poliklinik, dokterspesialis juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Instalasi RawatInap atau menjadi tangga medis yang membutuhkan operasi.

8. Kondisi Total Kunjungan Pasien IRJ RSSA

Di IRJ RSSA produk atau jasa medis yang ditawarkan sangatlahberagam.Terdapat kurang lebih 13 poliklinik yang mana masih ada ragamspesialisasipengobatan dalam setiap poliklinik. Pasien yang mempunyai keluhan tidak pada bagian tertentu maka akan diarahkan terlebih dahulu ke poli umum. Pada setiap kedatangan tidak menutup kemungkinan pada pasien berkonsultasi pada beberapa poli jika ditemukan gejala yang berkaitan denganbagian tubuh yang lain. Apabila sekitarnya terdapat komplikasi pada bagianbagain yang lain akan ke poli yang terkait, setelahnya hasil dari pemerikasaanlanjutan tersebut dikembalikan ke poli awal pasien diterima. Namun ada pula yang hatus melakukan tes-teS lain untuk dapat melihat penyakit apa yangdiderita pasien seperti tes laboratorium, tes radiologi, dan tes kesehatan lainnya yang dapat menunjang data anamnesis dan form rujukan pasien. Pasien akanmendatangitempat-tetnpat tes tersebut dengan membawa form riwayat penyakit.

B. Gambaran Karakteristik Responden

Gambaran karakteristik responden dapat diketahui berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan. Pada penelitian ini mendiskripsikan mengenai Pengaruh Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Terhadap Efisiensi Pengadaan Barang Barang dan Jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang). Hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan kepada 100 responden yaitu karyawan bagian pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang dan

dapat dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, status perkawinan dan lama bekerja berdasarkan hasil tersebut maka karakteristik responden dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Usia Responden

Karakteristik usia responden terdiri dari empat kelompok usia secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah (orang)	Prosentase
< 30 tahun	4	4%
30- 35 tahun	21	21%
>35 – 40 tahun	65	65%
> 40 tahun	10	10%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat diketahui bahwa dari 100 responden yaitu karyawan bagian pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai adalah berusia >35 – 40 tahun yaitu sebanyak 65 responden atau 65%. Banyaknya usia tersebut menunjukkan bahwa tingginya pengalaman kerja yang dimiliki para pegawai atas tugas dan tanggungjawab yang harus diselesaikan.

2. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin responden terdiri dari pria dan wanita yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Prosentase
Pria	63	63%
Wanita	37	37%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Dari tabel 4.2, dapat diketahui bahwa dari 100 responden yaitu karyawan bagian pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang menunjukkan bahwa sebanyak 63 responden atau sebesar 63% adalah pria dan 37 responden atau 37% adalah wanita. Berdasarkan hasil tersebut dapat membuktikan bahwa sebagian besar pegawai adalah pria, hal tersebut dikarenakan tingginya beban kerja yang harus diselesaikan para pegawai terutama dalam proses penyelesaian pekerjaan.

3. Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

Tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh responden yaitu SMP sampai pendidikan S2 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Prosentase
SMP	9	9%
SMU	21	21%
Perguruan Tinggi (S1)	63	63%
S2	7	7%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.3, dari 100 responden yaitu karyawan bagian pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang dapat diketahui bahwa sebagian besar memiliki tingkat pendidikan Perguruan

Tinggi (S1) yaitu sebanyak 63 responden atau 63% serta paling sedikit yaitu S2 dengan jumlah responden sebanyak 7 responden atau 7%. Berdasarkan hasil tersebut maka instansi selama ini pendidikan formal menjadi hal utama yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai, hal tersebut merupakan upaya dari instansi untuk mempekerjakan pegawai yang memiliki profesionalismen kerja yang tinggi serta didukung oleh tingkat pendidikan formalnya.

5. Status Perkawinan

Status perkawinan para responden terdiri dari status menikah dan belum menikah dan dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Status Perkawinan Responden

Status Perkawinan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Menikah	79	79%
Belum Menikah	21	21%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa karyawan yang belum menikah yaitu sebanyak 21 responden atau 21% dan sebanyak 79 responden atau 79% menikah. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa selama ini perusahaan banyak mempekerjakan pegawai yang sudah menikah, hal tersebut menjadi dukungan atas usaha karyawan untuk bekerja secara maksimal di instansi, terkait dengan pemenuhan kebutuhan bagi keluarga.

6. Masa Kerja Responden

Masa kerja responden dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok dan dapat disajikan pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Lama Bekerja	Jumlah (orang)	Prosentase
1 tahun – 5 tahun	21	21%
6 tahun – 10 tahun	56	56%
> 10 tahun	23	23%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.5, dari 100 responden yaitu karyawan bagian pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang menunjukkan bahwa sebanyak 21 responden atau 21% bekerja selama 1 tahun sampai 5 tahun, pegawai yang bekerja selama 6 tahun sampai 10 tahun yaitu sebanyak 56 responden atau 56% serta sebanyak 23 responden atau 23% yaitu bekerja lebih 10 tahun. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai telah bekerja pada diinstansi yaitu selama 6 tahun sampai 10 tahun. Masa kerja tersebut menunjukkan efisiensi pengadaan barang barang dan jasa pegawai terhadap instansi dalam bekerja.

B. Hasil Uji Instrumen

Dalam penelitian ini data merupakan penggambaran variabel yang akan diteliti sehingga benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian yang dilakukan. Sedangkan benar tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpul data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. Adapun secara

lengkap hasil pengujian validitas dan reliabilitas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk melihat valid tidaknya masing-masing instrumen dalam *Tangible* (X_1), *Assurance* (X_2), *Transparansi* (X_3), *Akuntabilitas* (X_4), *Partisipasif* (X_5) *Efektiveness* (X_6), *Responsiviness* (X_7) dan efisiensi pengadaan barang barang dan jasa (Y). Nilai kritik dari pengujian ini adalah 0,196 dengan df= n-1 taraf signifikan 0,05 (5%). Instrumen dikatakan valid jika angka koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari nilai kritik (r). Adapun secara lengkap hasil uji validitas pada pengujian ini untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas

Item	Validitas (Angka korelasi)	Nilai r_{tabel} N=100; α=5%	Hasil Uji
$X_{1.1}$	0,742	0,196	Valid
$X_{1.2}$	0,637	0,196	Valid
$X_{1.3}$	0,621	0,196	Valid
$X_{1.4}$	0,654	0,196	Valid
$X_{2.1}$	0,726	0,196	Valid
$X_{2.2}$	0,628	0,196	Valid
$X_{2.3}$	0,630	0,196	Valid
$X_{2.4}$	0,676	0,196	Valid
$X_{3.1}$	0,681	0,196	Valid
$X_{3.2}$	0,671	0,196	Valid
$X_{3.3}$	0,698	0,196	Valid

Item	Validitas (Angka korelasi)	Nilai r_{tabel} N=100; α=5%	Hasil Uji
$X_{4.1}$	0,742	0,196	Valid
$X_{4.2}$	0,637	0,196	Valid
$X_{4.3}$	0,621	0,196	Valid
$X_{5.1}$	0,662	0,196	Valid
$X_{5.2}$	0,632	0,196	Valid
$X_{5.3}$	0,627	0,196	Valid
$X_{5.4}$	0,747	0,196	Valid
$X_{6.1}$	0,717	0,196	Valid
$X_{6.2}$	0,702	0,196	Valid
$X_{6.3}$	0,745	0,196	Valid
$X_{7.1}$	0,704	0,196	Valid
$X_{7.2}$	0,642	0,196	Valid
$X_{7.3}$	0,737	0,196	Valid
$Y_{1.1}$	0,733	0,196	Valid
$Y_{1.2}$	0,762	0,196	Valid
$Y_{1.3}$	0,780	0,196	Valid

Sumber: Data primer diolah , 2016

Dari tabel 4.6, dapat dikatakan bahwa semua instrumen variabel *Tangible* (X_1), *Assurance* (X_2), *Transparansi* (X_3), *Akuntabilitas* (X_4), *Partisipasif* (X_5) *Efektiveness* (X_6), *Responsiviness* (X_7) dan efisiensi pengadaan barang barang dan jasa (Y) adalah valid, yang ditunjukkan nilai koefisien lebih besar dari nilai kritik pada tingkat signifikan 5%.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dihandalkan. Untuk melihat reabel atau tidak, dilakukan dengan melihat koefisien reliabilitas *(coefisient of Efektiveness)*. Nilai koefisien tersebut berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1

menunjukkan makin reliabel. Ukuran yang dipakai untuk semakin reliabel bilamana *Cronbach's Alpha* diatas 0,6. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah:

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas

Item	Koefisien Reliabilitas	Hasil Uji
Tangible (X1)	0,760	Reliabel
Assurance (X2)	0,761	Reliabel
Transparansi (X3)	0,761	Reliabel
Akuntabilitas (X4)	0,763	Reliabel
Partisipasif (X5)	0,786	Reliabel
Efektiveness (X6)	0,720	Reliabel
Responsiviness (X7)	0,770	Reliabel
Efisiensi pengadaan barang barang dan jasa (Y)	0,806	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat dikatakan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel, hal tersebut dikarenakan nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,6.

C. Diskripsi Jawaban Responden

Diskripsi jawaban responden dapat menggambarkan tanggapan responden atas kuesioner yang telah diberikan kepada responden yaitu karyawan bagian pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Untuk mengetahui diskripsi jawaban responden tersebut secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Tangible* (X_1)

Tabel 4.8
Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel *Tangible* (X_1)

Item	Jawaban Responden										Jumlah Responden
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%	
$X_{1.1}$	6	6%	60	60%	31	31%	3	3%	0	0	100
$X_{1.2}$	5	5%	62	62%	32	32%	1	1%	0	0	100
$X_{1.3}$	6	6%	58	58%	35	35%	1	1%	0	0	100
$X_{1.4}$	6	6%	71	71%	22	22%	1	1%	0	0	100

Sumber : Data primer diolah, 2016

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai Penampilan Website LPSE menarik. Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (6%), sebanyak 60 orang atau 60% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 31 (31%) responden serta sebanyak 3 respopnden atau 3% menyatakan tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa penampilan Website LPSE menarik.

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai fitur-fitur LPSE mudah dipahami. Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (5%), sebanyak 62 orang atau 62% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 32 (32%) responden serta sebanyak 1 respopnden atau 1% menyatakan tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa fitur-fitur LPSE mudah dipahami.

Responden memberikan tanggapan atas pernyataan mengenai Website LPSE mendukung dalam pelayanan. Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (6%), sebanyak 58 orang atau 58% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 35 (35%) responden serta sebanyak 1 respopnden atau 1% menyatakan tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE mendukung dalam pelayanan.

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai Website LPSE memberikan kemudahan dalam pembaruan informasi. Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (6%), sebanyak 71 orang atau 71% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 22 (22%) responden serta sebanyak 1 respopnden atau 1% menyatakan tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE memberikan kemudahan dalam pembaruan informasi.

b. *Assurance* (X_2)

Tabel 4.9

Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel *Assurance* (X_2)

Item	Jawaban Responden										Jumlah Responden
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%	
$X_{2.1}$	8	8%	62	62%	28	28%	2	2%	0	0	100
$X_{2.2}$	6	6%	63	63%	31	31%	0	0	0	0	100
$X_{2.3}$	8	8%	61	61%	30	30%	1	1%	0	0	100
$X_{2.4}$	9	9%	64	64%	26	26%	1	1%	0	0	100

Sumber : Data primer diolah, 2016

Responden memberikan tanggapan atas pernyataan jaminan biaya LPSE lebih rendah. Pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden yang

menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (8%), sebanyak 62 orang atau 62% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 28 (28%) responden serta sebanyak 2 respopnden atau 2% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa jaminan biaya LPSE lebih rendah.

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai adanya jaminan legalitas LPSE dalam pelayanan. Pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (6%), sebanyak 63 orang atau 63% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 31 (31%) responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa adanya jaminan legalitas LPSE dalam pelayanan.

Responden memberikan tanggapan atas pernyataan adanya jaminan keamanan dan kerahasiaan dokumen. Pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (8%), sebanyak 61 orang atau 61% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 30 (30%) responden serta sebanyak 1 respopnden atau 1% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa adanya jaminan keamanan dan kerahasiaan dokumen.

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai adanya jaminana waktu dalam pelayanan. Pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang (9%), sebanyak 64 orang atau

64% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 26 (26%) responden serta sebanyak 1 respopnden atau 1% menyatakan tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa adanya jaminana waktu dalam pelayanan.

c. *Transparansi* (X_3)

Tabel 4.10
Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel *Transparansi* (X_3)

Item	Jawaban Responden										Jumlah Responden
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%	
$X_{3.1}$	5	5%	65	65%	27	27%	3	3%	0	0	100
$X_{3.2}$	8	8%	66	66%	25	25%	1	1%	0	0	100
$X_{3.3}$	14	14%	70	70%	16	16%	0	0%	0	0	100

Sumber : Data primer diolah, 2016

Responden memberikan tanggapan atas pernyataan mengenai Website LPSE memberikan keterbukaan dalam pelayanan. Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (5%), sebanyak 65 orang atau 65% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 27 (27%) responden serta sebanyak 3 respopnden atau 3% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE memberikan keterbukaan dalam pelayanan.

Tanggapan responden atas pernyataan bahwa Website LPSE memebrikan kemudahan dalam pelayanan. Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (8%), sebanyak 66 orang atau 66% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 25 (25%) responden serta sebanyak 1 respopnden

atau 1% menyatakan tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE memebrikan kemudahan dalam pelayanan.

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa Website LPSE dapat diakses semua pihak. Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 orang (14%), sebanyak 70 orang atau 70% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 16 (16%) responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE dapat diakses semua pihak.

d. *Akuntabilitas* (X_4)

Tabel 4.11
Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel *Akuntabilitas* (X_4)

Item	Jawaban Responden										Jumlah Responden
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%	
$X_{4.1}$	6	6%	66	66%	27	27%	1	1%	0	0	100
$X_{4.2}$	6	6%	62	62%	32	32%	0	0%	0	0	100
$X_{4.3}$	12	12%	59	59%	27	27%	2	2%	0	0	100

Sumber : Data primer diolah, 2016

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (6%), sebanyak 66 orang atau 66% menyatakan setuju, responden yang menyatakan netral sebanyak 27 (27%) responden dan sebanyak 1 responden atau 1% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa

sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Responden memberikan tanggapan atas pernyataan Website LPSE dapat mengurangi tingkat kecurangan. Pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (6%), sebanyak 62 orang atau 62% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 32 (32%) responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE dapat mengurangi tingkat kecurangan.

Tanggapan responden atas pernyataan Website LPSE dapat memberikan kemudahan dalam pengawasan. Pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang (12%), sebanyak 59 orang atau 59% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 27 (27%) responden serta sebanyak 2 responden atau 2% menyatakan tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE dapat memberikan kemudahan dalam pengawasan.

e. *Partisipasif* (X_5)

Tabel 4.12
Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel *Partisipasif* (X_5)

Item	Jawaban Responden										Jumlah Responden
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%	
$X_{5.1}$	9	9%	56	56%	35	35%	0	0%	0	0	100
$X_{5.2}$	5	5%	62	62%	33	33%	0	0%	0	0	100
$X_{5.3}$	10	10%	62	62%	27	27%	1	1%	0	0	100
$X_{5.4}$	6	6%	60	60%	34	34%	0	0%	0	0	100

Sumber : Data primer diolah, 2016

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai Website LPSE dapat mendorong peran serta masyarakat. Pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang (9%), sebanyak 56 orang atau 56 % menyatakan setuju, responden yang menyatakan netral sebanyak 35 (35%) responden. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE dapat mendorong peran serta masyarakat.

Responden memberikan tanggapan atas pernyataan bahwa Website LPSE memperhatikan aspirasi. Pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (5%), sebanyak 62 orang atau 62% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 33 (33%) responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE memperhatikan aspirasi.

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai Website LPSE sesuai kebutuhan masyarakat. Pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang (10%), sebanyak 62 orang atau 62 % menyatakan setuju, responden yang menyatakan netral sebanyak 27 (27%) responden dan sebanyak 1 responden atau 1% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE sesuai kebutuhan masyarakat.

Responden memberikan tanggapan atas pernyataan bahwa Website LPSE dapat mendukung jaminan pelayanan terbaik. Pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (6%), sebanyak 60 orang atau 60% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 34 (34%) responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE dapat mendukung jaminan pelayanan terbaik.

f. *Efektiveness* (X_6)

Tabel 4.13
Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel *Efektiveness* (X_6)

Item	Jawaban Responden										Jumlah Responden
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%	
$X_{6.1}$	11	11%	68	68%	20	20%	1%	0	0	0	100
$X_{6.2}$	8	8%	64	64%	24	24%	1	0	0	0	100
$X_{6.3}$	13	13%	59	59%	27	27%	1	0	0	0	100

Sumber : Data primer diolah, 2016

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai Website LPSE memberikan ruang adanya persaingan sehat. Pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang (11%), sebanyak 68 orang atau 68% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 20 (20%) responden serta sebanyak 1 responden atau 1% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE memberikan ruang adanya persaingan sehat.

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan Website LPSE dapat mengurangi biaya pelaksanaan. Pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (8%), sebanyak 64 orang atau 64% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 24 (24%) responden serta sebanyak 4 responden atau 4% menyatakan tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE dapat mengurangi biaya pelaksanaan.

Tanggapan responden atas pernyataan Website LPSE dapat mendukung efisiensi waktu pelaksanaan. Pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (13%), sebanyak 59 orang atau 59% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 27 (27%) responden serta sebanyak 1 responden atau 1% menyatakan tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE dapat mendukung efisiensi waktu pelaksanaan.

f. *Responsiviness* (X7)

Tabel 4.14
Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel (X7)

Item	Jawaban Responden										Jumlah Responden
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%	
$X_{7.1}$	13	13%	64	64%	20	20%	3	3%	0	0	100
$X_{7.2}$	10	10%	68	68%	22	22%	0	0	0	0	100
$X_{7.3}$	15	15%	57	57%	24	24%	4	4%	0	0	100

Sumber : Data primer diolah, 2016

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai Website LPSE dapat mendukung pelayanan yang cepat. Pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (13%),

sebanyak 64 orang atau 64% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 20 (20%) responden serta sebanyak 3 responden atau 3% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE dapat mendukung pelayanan yang cepat.

Responden memberikan tanggapan atas pernyataan Website LPSE dapat mendukung pelayanan yang cermat. Pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang (10%), sebanyak 68 orang atau 68% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 22 (22%) responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE dapat mendukung pelayanan yang cermat.

Tanggapan responden atas pernyataan Website LPSE dapat mendukung pelayanan terhadap keluhan pengguna. Pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang (15%), sebanyak 57 orang atau 57% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 24 (24%) responden serta sebanyak 4 responden atau 4% menyatakan tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Website LPSE dapat mendukung pelayanan terhadap keluhan pengguna.

f. Efisiensi pengadaan barang barang dan jasa Konsumen (Y)

Tabel 4.15

Diskripsi Jawaban Responden Tentang Efisiensi pengadaan barang barang dan jasa Konsumen (Y)

Item	Jawaban Responden										Jumlah Responden
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%	
$Y_{1.1}$	11	11	52	52	36	36	1	1%	0	0	100
$Y_{1.2}$	15	15	57	57	28	28	0	0	0	0	100
$Y_{1.3}$	13	13	66	66	21	21	0	0	0	0	100

Sumber : Data primer diolah, 2016

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai adanya Website LPSE pengadaan barang dan jasa tepat secara kuantitas. Pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11orang (11%), sebanyak 52 orang atau 52% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 36 orang (36%) serta sebanyak 1 respopnden atau 1% menyatakan tidak setuju. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa adanya Website LPSE pengadaan barang dan jasa tepat secara kuantitas.

Responden memberikan tanggapan atas pernyataan mengenai adanya Website LPSE pengadaan barang dan jasa tepat secara kualitas. Pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang (15%), sebanyak 57 orang atau 57% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 28 (28%) responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa adanya Website LPSE pengadaan barang dan jasa tepat secara kualitas.

Tanggapan responden atas pernyataan adanya Website LPSE pengadaan barang dan jasa tepat secara waktu pengadaan. Pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (13%), sebanyak 66 orang atau 66% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 21 (21%) responden. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju menanggapi pernyataan bahwa adanya Website LPSE pengadaan barang dan jasa tepat secara waktu pengadaan.

D. Metode Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk membuktikan apakah model regresi linier berganda yang dipergunakan dalam penelitian memiliki persamaan yang tidak bias yang terbaik (*Best Linier Unbias Estimator / BLUE)*, maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi ekonometrika. Evaluasi ekonometrika terdiri dari uji normalitas data, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Namun dalam penelitian ini tidak menggunakan uji autokorelasi karena data yang digunakan bukan merupakan data *time series* atau waktu berkala.

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linier yang sempurna. Hal tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh Santoso (2002:203) bahwa tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel *independent.* Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Untuk

mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dari besarnya VIF (*Variance Inflating Factor*) dan *tolerance.* Berikut ini akan disajikan hasil pengujian multikolinearitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS *for windows,* secara lengkap hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,454	,963		-1,511	,134		
	Tangible	,107	,048	,150	2,219	,029	,970	1,044
	Assurance	,098	,046	,137	2,110	,038	,975	1,033
	Transparansi	,290	,078	,282	3,718	,000	,955	1,080
	Akuntabilitas	,270	,086	,270	3,153	,002	,944	1,030
	Partisipasif	,242	,100	,242	2,427	,017	,974	1,035
	Efektiveness	,265	,102	,262	2,594	,004	,977	1,030
	Responsiviness	,219	,094	,188	2,339	,022	,949	1,024

a. Dependent Variable: Efisiensi pengadaan barang barang dan jasa

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas di sekitar angka satu dan nilai *tolerance* mendekati angka 1.Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi bisa dilihat dari pola yang terbentuk pada titik-titik yang terdapat pada grafik *scaterplot.*Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat disajikan pada grafik berikut:

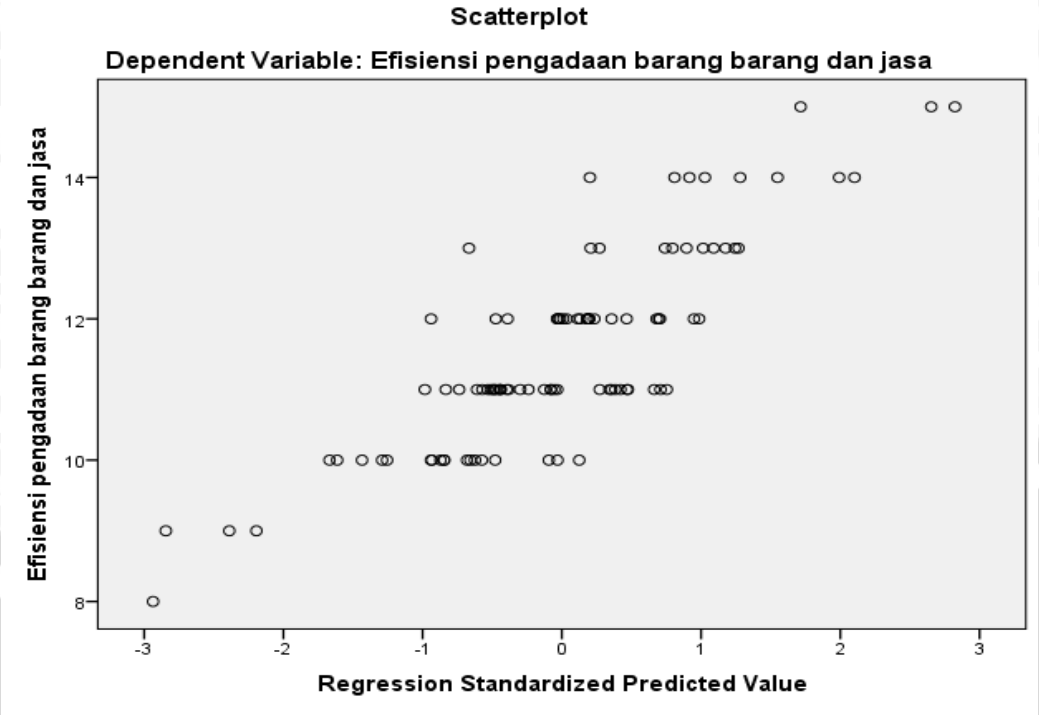

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa titik-titik yang terbentuk pada grafik *scaterplot* tidak membentuk pola yang jelas serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan bebas heteroskedastisitas

c. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode uji sampel *Kolmogorov-Smirnov* dengan *test distribution normal* dimana kriteria yang digunakan yaitu: jika Sig > taraf signifikansi (α= 0,05) maka data penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data dapat disajikan pada Tabel 4.17

Tabel 4.17
Hasil Uji Normalitas Data

Variabel	Sig.	Standar	Hasil
Tangible (X1)	0,453	0,05	Berdistribusi normal
Assurance (X2)	0,340	0,05	Berdistribusi normal
Transparansi (X3)	0,344	0,05	Berdistribusi normal
Akuntabilitas (X4)	0,202	0,05	Berdistribusi normal
Partisipasif (X5)	0,234	0,05	Berdistribusi normal
Efektiveness (X6)	0,139	0,05	Berdistribusi normal
Responsiviness (X7)	0,223	0,05	Berdistribusi normal
Efisiensi (Y)	0,450	0,05	Berdistribusi normal

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji normalitas data dapat diperoleh nilai sig. lebih besar dari 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Dalam bagian ini disajikan hasil statistik mengenai pengaruh Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang meliputi dimensi *tangible assurance*, transparansi, akuntabilitas, patisipasif, *efektiveness*, dan *responsiviness* terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang), dengan hasil penelitian yang telah diolah komputer melalui program SPSS dengan analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) secara parsial dan simultan.

Tabel 4.18

Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,454	,963		-1,511	,134		
	Tangible	,107	,048	,150	2,219	,029	,970	1,044
	Assurance	,098	,046	,137	2,110	,038	,975	1,033
	Transparansi	,290	,078	,282	3,718	,000	,955	1,080
	Akuntabilitas	,270	,086	,270	3,153	,002	,944	1,030
	Partisipasif	,242	,100	,242	2,427	,017	,974	1,035
	Efektiveness	,265	,102	,262	2,594	,004	,977	1,030
	Responsiviness	,219	,094	,188	2,339	,022	,949	1,024

a. Dependent Variable: Efisiensi pengadaan barang barang dan jasa

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* adalah besar, hal tersebut dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu sebesar 0,706. Dengan demikian berarti bahwa pengaruh variabel kulitas produk terhadap efisiensi pengadaan barang barang dan jasa konsumen atas kualitas produk yaitu sebesar 70,6% dijelaskan oleh variabel *Tangible*, *Assurance*, *Transparansi*, *Akuntabilitas*, *Partisipasif*, *Efektiveness* dan *Responsiviness* sedangkan sisanya sebesar 29,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Koefisien korelasi berganda R (*multiple corelation*) menggambarkan kuatnya hubungan antara variabel *independent* yang meliputi variabel *Tangible, Assurance, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasif, Efektiveness* dan *Responsiviness* secara bersama-sama terhadap variabel *dependent* yaitu efisiensi pengadaan barang barang dan jasa konsumen (Y) adalah sebesar

0,840. Hal ini berarti hubungan antara keseluruhan variabel adalah sangatlah erat karena nilai R tersebut mendekati 1.

Berdasarkan hasil analisis regresi, maka dapat dirumuskan suatu persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -1{,}454+0{,}107\ X_1 + 0{,}098X_2 + 0{,}290X_3 + 0{,}270X_4 + 0{,}242X_5 + 0{,}265X_6 + 0{,}219X_7 + 0{,}793$$

Dari persamaan garis regresi linier berganda, maka dapat diartikan bahwa:

a= -1,454 menunjukkan efisiensi pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai negatif apabila *Tangible*, *Assurance*, *Transparansi*, *Akuntabilitas*, *Partisipasif*, *Efektiveness* dan *Responsiviness* sama dengan nol.

b_1= 0,107 merupakan slope atau koefisien arah yang positif dari variabel *Tangible* (X_1) yang mempengaruhi efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen (Y), artinya variabel *Tangible* berpengaruh positif terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen, jika variabel lainnya dianggap konstan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya *Tangible* maka efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen mengalami peningkatan.

b_2= 0,098 merupakan slope atau koefisien arah yang positif dari variabel *Assurance* (X_2) yang mempengaruhi efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen (Y), artinya variabel *Assurance* berpengaruh positif terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen, jika variabel lainnya dianggap konstan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin

meningkatnya *Assurance* maka efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen mengalami peningkatan.

b_3= 0,290 merupakan slope atau koefisien arah yang positif dari variabel *Transparansi* (X_3) yang mempengaruhi efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen (Y), artinya variabel *Transparansi* berpengaruh positif terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen, jika variabel lainnya dianggap konstan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya *Transparansi* maka efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen mengalami peningkatan.

b_4= 0,270 merupakan slope atau koefisien arah yang positif dari variabel *Akuntabilitas* (X_4) yang mempengaruhi efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen (Y), artinya variabel *Akuntabilitas* berpengaruh positif terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen, jika variabel lainnya dianggap konstan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya *Akuntabilitas* maka efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen mengalami peningkatan.

b_5= 0,242 merupakan slope atau koefisien arah yang positif dari variabel *Partisipasif* (X_5) yang mempengaruhi efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen (Y), artinya variabel *Partisipasif* berpengaruh positif terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen, jika variabel lainnya dianggap konstan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya *Partisipasif* maka efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen mengalami peningkatan.

b_6= 0,265 merupakan slope atau koefisien arah yang positif dari variabel *Efektiveness* (X_5) yang mempengaruhi efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen (Y), artinya variabel *Efektiveness* berpengaruh positif terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen, jika variabel lainnya dianggap konstan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya *Efektiveness* maka efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen mengalami peningkatan.

b_7= 0,219 merupakan slope atau koefisien arah variabel yang positif dari *Responsiviness* (X_7) yang mempengaruhi efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen (Y), artinya variabel *Responsiviness* berpengaruh positif terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen, jika variabel lainnya dianggap konstan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya *Responsiviness* maka efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen mengalami peningkatan.

e = 0,793 merupakan nilai residu atau kemungkinan kesalahan dari model persamaan regresi, yang disebabkan karena adanya kemungkinan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen, tetapi tidak dimasukkan kedalam model persamaan.

3. Hasil Uji Hipotesis I

Dari hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan Df_1 = 7 dan Df_2= 92 pada alpha sebesar 5% diperoleh F_{Tabel} sebesar 2,300. $F_{hitungnya}$ diperoleh sebesar 31,504 sehingga dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{Tabel,}$ sehingga H_o ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan angka tersebut dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel *Tangible*, *Assurance*, *Transparansi*, *Akuntabilitas*, *Partisipasif*, *Efektiveness* dan *Responsiviness* berpengaruh terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen. Adanya pengaruh positif signifikan menunjukkan bahwa dengan semakin baiknya *Tangible*, *Assurance*, *Transparansi*, *Akuntabilitas*, *Partisipasif*, *Efektiveness* dan *Responsiviness* maka efisiensi pengadaan barang dan jasa akan mengalami peningkatan.

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel *independent*, yaitu variabel *Tangible*, *Assurance*, *Transparansi*, *Akuntabilitas*, *Partisipasif*, *Efektiveness* dan *Responsiviness* secara parsial berpengaruh terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen, maka digunakan uji t (t- *test*) yaitu dengan cara membandingkan dengan t_{Tabel}, Nilai t $_{Tabel}$pada alpha sebesar 5% diperoleh angka sebesar 1,9845. Hasil perbandingan antara nilai t $_{hitung}$ dengan t $_{Tabel}$ dapat disajikan pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19

Perbandingan Antara Nilai t_{hitung} Dengan t_{Tabel}

Variabel	t $_{hitung}$	t_{Tabel}	Keterangan
Tangible	2,219	1,9845	Signifikan
Assurance	2,110	1,9845	Signifikan
Transparansi	3,718	1,9845	Signifikan
Akuntabilitas	3,153	1,9845	Signifikan
Partisipasif	2,427	1,9845	Signifikan
Efektiveness	2,594	1,9845	Signifikan
Responsiviness	2,339	1,9845	Signifikan

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji t maka dapat diketahui bahwa secara parsial variabel *Tangible, Assurance, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasif, Efektiveness* dan *Responsiviness* berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen, hal tersebut dibuktikan dengan nilai t_{hitung} seluruh variabel mempunyai nilai > t_{Tabel} . Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa hipotesis satu yang diajukan terbukti diterima yang menyatakan bahwa variabel *Tangible, Assurance, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasif, Efektiveness* dan *Responsiviness* baik secara simultan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen.

4. Hasil Uji Hipotesis II

Sedangkan dalam hal besarnya pengaruh masing-masing variabel secara keseluruhan dapat dilihat dari koefisien regresi masing-masing (*standardized coefficients*), dimana variabel *Tangible* yaitu sebesar 0,107, *Assurance* sebesar 0,098, *Transparansi* sebesar 0,290, *Akuntabilitas* sebesar 0,270, *Partisipasif* sebesar 0,242, *Efektiveness* sebesar 0,265 dan *Responsiviness* sebesar 0,219. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel *Transparansi* mempunyai pengaruh dominan terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh secara parsial Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang meliputi dimensi *tangible assurance*, transparansi, akuntabilitas, patisipasif, *efektiveness*, dan *responsiviness* terhadap efisiensi pengadaan barang barang dan jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang). Hasi analisis menunjukkan bahwa dengan semakin baiknya Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maka semakin efisien pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang.
2. Terdapat secara simultan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang meliputi dimensi *tangible assurance*, transparansi, akuntabilitas, patisipasif, *efektiveness*, dan *responsiviness* terhadap efisiensi pengadaan barang barang dan jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang). Adanya pengaruh secara simultan dapat diartikan bahwa upaya pencapaian efisiensi yang merupakan pencapaian sebuah sasaran akhir dengan memakai jumlah sumber daya yang paling sedikit. Semakin tingginya efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa maka keputusan organisasi atas anggota dari suatu

administrasi ditentukan apakah kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dipatuhi sebagai fungsi utama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan kondisi ini apat terwujud dengan semakin baiknya pelaksanaan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

3. *Transparansi* mempunyai pengaruh dominan terhadap efisiensi pengadaan barang barang dan jasa (Studi kasus di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang). Adanya pengaruh dominan menunjukkan bahwa dengan adanya keterbukaan dalam pelayanan, memberikan kemudahan dalam pelayanan dan dapat diakses semua pihak memiliki pengaruh yang paling tinggi terhadap upaya peningkatan efisiensi pengadaan barang barang dan jasa.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka perusahaan disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Instansi
   a. Instansi harus selalu melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sehingga aktivitas yang dilakukan dapat secara maksimal dapat mendukung upaya efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menjalankan sistem dan prosedur dengan benar sehingga seluruh aktivitas dalam pelaksanaan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
   b. Pelaksanaan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)diharapkan mampu memberikan dukungan sistem pelayanan yang terbuka sehingga

seluruh aktivitas pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara transparan sehingga dapat memberikan dukungan dalam upaya pelaksanaan sistem tata kelola yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel lain yang berpengaruh terhadap efisien pengadaan barang dan jasa sehingga penelitian tersebut dapat lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Al Fatta, Hanif. 2009. *Analisis & Perancangan Sistem Informasi Untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan & Organisasi Modern*. Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta: ANDI.

Anzizhan, Syafaruddin. 2004. *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*.Jakarta:Grasindo.

Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Cetakan Keempat. Jakarta:Erlangga.

Guswai, Christian F. 2007. *How To Operate Your Store Effectively Yet Efficiently*. Penerjemah Tim Elex Media Komputindo. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia.

Heryandi, Andri, Irawan Afrianto, dan Sufa.atin. 2011. Kajian Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Menuju Ara E-Procurement Unikom. *Majalah Ilmiah Unikom Vol 1o. Hal 41-50*.pdf.

Instruksi Presiden No 1 Tahun 2013 *tentang aksi pencegahan dan pemberatasan korupsi*

Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2003 *tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-govermment* www.apjii.or.id/v2/upload/.../**InPres**RI3Th**2003**.pdf

Kegiatan Kemenperin. *Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)* Kemenperin. Agustus 2015. www.**kemenperin**.go.id/.../**Sosialisasi-Layanan-Pengad**...

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).2015. *Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)*. 17 Agustus 2015 03:00. https://**lpse**.lkpp.go.id/

LKPP. *Buku manual SPSE v.3.5.* Panitia LPSS.pdf.

Nightisabha, Ita Akyuna, Djoko Suhardjanto dan Bayu Tri Cahya. 2009. Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E Procurement. Universitas Sebelas Maret Surakarta. *Jurnal Siasat Bisnis. Vol 13 No. 2. Agustus*. Hal 129-150.pdf.

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan. www lpse.blog.unair.ac.id/.../isi-perpres-no-54-tahun-2010...

Pratiwi, Gori Lusi, Choirul Saleh dan Abdul Wahid. 2014. Akuntanbilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Procurement (Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri) *Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol 2. No. 2*. Hal 344-349.pdf.

Udoyono, Kodar. 2012. *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan. Volume 3 Nomor 1 Februari 2012*. Hal 127-160.pdf.

Wahyuningsih, Sri Eti, Wijaya Kusuma, Martoyo. 2013. Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BP2AMKB) Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-2013*. Hal 1-16. Pdf.

Widiastuti. 2008. *Analisis Dan Perancangan Sistem Pengadaan Barang Pada PT. Indo Mitra Pratama*. Universitas Gunadarma. Rangkuman skripsi dipublikasikan. Hal 1-35.pdf.

Miles, Huberman and Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. United Kingdom: Arizona State University.

Minogue, Martin & Ledvina Carino, *eds*., 2006. *Regulatory Governance In Developing Countries.* Edward Elgar, UK Northamton.

Yeremias T Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik, Konep, Teori, dan Isu.* Yogyakarta: Gava Media.

Rosenbloom, David H., Robert S. Kravchuk, 2005, *Public Administration, Understanding Management, Politic and Law in The Public sector*, New York, Dydney, McGraw-Hill.

Indrajit, Richardus Eko, 2002. *E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital.* Yogyakarta:Andi Offset.

Akadun. 2009. Administrasi Perusahaan Negara. Bandung: Alfabeta.

Hardiansyah .2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Retnowati, 2008, *Teori Dan Analisis Politik Pemerintahan*. Jakarta:PT.Perca.